

**IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN STIMULAN  
PERUMAHAN SWADAYA DI DESA PACCERAKANG  
KECAMATAN PONRANG SELATAN  
KABUPATEN LUWU**



**SKRIPSI**

Di Susun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Pada Program Studi Administrasi Negara

Oleh:

**OLIVIA CRISTY STEVIANI TODING**

**4518021018**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
ADMINISTRASI NEGARA  
UNIVERSITAS BOSOWA**

**2022**

## HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu

Nama Mahasiswa : Olivia Cristy Steviani Toding

Nomor Stambuk : 4518021018

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Makassar, 15 Agustus 2022

Menyetujui ;

Pembimbing I

**Drs. Natsir Tompo, M.Si.**  
NIDN. 0901065901

Pembimbing II

**Ade Ferry Afrisal, S.H., M.Sc.**  
NIDN. 0910128704

Mengetahui,

Dekan FISIP  
Universitas Bosowa Makassar

**Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si**  
NIDN. 0905101005

Ketua Jurusan  
Ilmu Administrasi Negara

**Drs. Natsir Tompo, M.Si**  
NIDN. 0901065901



## HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Senin Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Dengan Judul Skripsi **Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Pongrang Selatan Kabupaten Luwu.**

Nama : **Olivia Cristy Steviani Toding**

Nomor Stambuk : **4518021018**

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

### Panitia Ujian :



**Dr. A. Burchanuddin, S.Sos, M.Si**

Ketua

**Drs. Natsir Tompo, M.Si**

Sekretaris

### Tim Penguji :

1. Drs. Natsir Tompo, M.Si

  
(.....)

2. Ade Ferry Afrisal, SH., M.Sc

  
(.....)

3. Dr. H. Zainuddin Mustapa, S.Psi., M.Si., MH

  
(.....)

4. Dr. Nurkaidah, M.M

  
(.....)

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Olivia Cristy Steviani Toding  
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa  
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara  
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN  
STIMULAN PERUMAHAN SWADAYA DI DESA  
PACCERAKANG KECAMATAN PONRANG  
SELATAN KABUPATEN LUWU**

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga

Makassar, 22 Agustus 2022



Olivia Cristy Steviani Toding

4518021018

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan karunian-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu”. Penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar S1 di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Ilmu Administrasi Negara.

Penulis menyadari bahwa tanpa adanya doa, bimbingan, dan bantuan dari pihak-pihak yang terlibat dalam penelitian ini akan sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Maka dari itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang berbesar-berbesarnya atas dukungan tersebut kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Batara Surya, S.T., M.Si selaku Rektor Universitas Bosowa
2. Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fasilitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa
3. Drs. Natsir Tompo, M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
4. Drs. Natsir Tompo, M.Si selaku Pembimbing 1 dan Ade Ferry Afrisal, S.H.,M.Sc. selaku pembimbing 2 yang selalu bijaksana memberikan bimbingan, nasehat serta waktunya selama proses pembimbingan proposal hingga skripsi
5. Segenap bapak dan ibu dosen yang telah membantu penulis selama kuliah sampai poses penyusunan skripsi

6. Orang Tua penulis yakni Bapak Rabi Tiku dan Ibu Lince terima kasih yang selalu memberikan dukungan serta iringan doa, terima kasih atas didikannya selama ini, kasih sayang, menyalurkan semangat yang tiada hentinya sehingga kalian yang menjadi satu-satunya alasan utama skripsi ini bisa dan harus diselesaikan.
7. Segenap keluarga Adik, Om, Tante, khususnya Tante Selvi yang juga selalu mendukung dalam menyelesaikan skripsi, terima kasih atas dukungan dan semangat yang di berikan terhadap penulis.
  8. Keluarga Puriyuhana Permai yang juga membantu dalam mendukung penulis.
9. Saudara Raydho yang juga mendukung dan memberi semangat penulis dalam menyelesaikan skripsi.
10. Teman-teman begadang Basecamp (Rumah Santi), dan juga teman seperjuangan adinda, celin.
11. Keluarga BEM KEMA (Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Keluarga HIMAN (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara) yang telah memberikan semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam proses dan belajar.
12. Saudara-saudari Prodi Administrasi Negara Angkatan 2018.
13. Saudara-saudari menjadi sahabat senasib dan seperjuangan penulis yaitu ARASH 18.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidup penulis. Kata maaf dan ucapan terima kasih yang tak terkira atas



semuanya. Sekecil apapun perkenalan itu dari garis hidup penulis, sungguh suatu hal yang amat sangat luar biasa bagi penulis diatas segalanya,ucapan terima kasih kepada Allah SWT yang telah mendatangkan mereka dalam kehidupan penulis,

Makassar, 22 Agustus 2022

Penulis



Olivia Crisy Steviani Toding



UNIVERSITAS  
**BOSOWA**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENERIMAAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xv</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis .....	8
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>9</b>
A. Konsep Implementasi Kebijakan .....	9



1. Implementasi Kebijakan .....	9
2. Model Implementasi Kebijakan .....	10
3. Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Kebijakan .....	18
B. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).....	20
1. Pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) .....	20
2. Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) .....	23
3. Kriteria dan Persyaratan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).....	24
4. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) .....	25
C. Kemiskinan .....	26
1. Pengertian Kemiskinan .....	26
2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan .....	27
3. Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan .....	29
D. Penelitian Terdahulu .....	32
E. Kerangka Konsep .....	34
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>36</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	36
B. Lokasi Penelitian.....	36
C. Informan Penelitian.....	36
D. Fokus Penelitian.....	39
E. Instrumen Penelitian .....	39
F. Sumber Data.....	40
G. Teknik Pengumpulan Data.....	40

H. Teknik Analisis Data.....	42
I. Teknik Keabsahan Data .....	43
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	48
B. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Pongrang Selatan Kabupaten Luwu.....	52
C. Ketercapaian Pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Pongrang Selatan Kabupaten Luwu.....	68
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>76</b>
A. Kesimpulan .....	76
B. Saran .....	77
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep .....	35
Gambar 2 Peta Kabupaten Luwu .....	48
Gambar 3 Peta Desa Paccerakang.....	50
Gambar 4 Struktur Pemerintahan Desa Paccerakang.....	51

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## DAFTAR TABEL

Table 1 Penelitian Terdahulu .....	32
Tabel 2 Jumlah Penduduk Desa Paccerakang.....	51
Table 3 Nama-Nama Penerima Bantuan BPS Tahun 2022 .....	69

UNIVERSITAS

**BOSOWA**



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Izin Meneliti di Desa Paccerakang
- Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Meneliti ke Dinas PERKIM
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa Paccerakang
- Lampiran 4. Dokumentasi Dengan Kepala Desa Paccerakang tentang proses pelaksanaan BSPS, dana Program BSPS
- Lampiran 5. Dokumentasi dengan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) tentang fungsi TFL, proses pelaksanaan, serta sasaran dari program BSPS di Desa Paccerakang
- Lampiran 6. Dokumentasi dengan Tim Fasilitator Lapangan di Desa Paccerakang tentang fungsi TFL, proses pelaksanaan, serta sasaran dari program BSPS di Desa Paccerakang
- Lampiran 7. Dokumentasi sosialisasi PROGRESS BSPS di Desa Paccerakang
- Lampiran 8. Dokumentasi sosialisasi PROGRESS BSPS di Desa Paccerakang
- Lampiran 9. Dokumentasi di Dinas PERKIM
- Lampiran 10. Dokumentasi dengan Tim Verifikasi Data pada Dinas PERKIM tentang fungsi Dinas PERKIM dalam pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang
- Lampiran 11. Dokumentasi Masyarakat Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tentang dana yang diberikan

Lampiran 12. Dokumentasi Masyarakat Penerima Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya tentang manfaat BPS yang di rasakan

Lampiran 13. Dokumentasi Masyarakat Penerima Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya tentang bantuan BPS telah tepat sasaran

Lampiran 14. Dokumentasi Pembangunan Penerima Bantuan BPS

Lampiran 15. Dokumentasi Pembangunan Penerima Bantuan BPS

Lampiran 16. Dokumentasi Pembangunan Penerima Bantuan BPS

Lampiran 18. Dokumentasi Pembangunan Penerima Bantuan BPS

UNIVERSITAS

**BOSOWA**

## **ABSTRAK**

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan Program Bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) untuk membangun rumah yang layak huni.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu dan juga untuk mengetahui ketercapaian Program BSPS di Desa Paccerakang Luwu.

Berdasarkan hasil penelitian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Paccerakang belum sepenuhnya berhasil secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan adanya pembangunan yang tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Ini karena kurangnya kesadaran penerima untuk bergotong royong dalam membangun, masih ditemukan penerima bantuan masih mengerjakan bangunan secara individual. Selain itu kurang tegasnya implementor dalam mendampingi. Jika implementor dapat bersikap tegas dalam mengawasi pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang akan sangat berpengaruh pada ketepatan waktu yang diberikan dalam menyelesaikan pembangunan.

**Kata Kunci: Implementasi, BSPS, Masyarakat Berpenghasilan Rendah.**

## **ABSTRACT**

Self-help Housing Stimulant Assistance (BSPS) is an Assistance Program from the Ministry of Public Works and Public Housing (PUPR) for low-income communities (MBR) to build houses that are livable.

The type of research in this research is descriptive qualitative research. The purpose of this study is to determine the process of implementing BSPS in Paccerakang Village, South Ponrang District, Luwu Regency and also to determine the achievement of the BSPS Program in Paccerakang Village, Luwu.

Based on the results of the research, the Self-Help Housing Stimulant Assistance (BSPS) in Paccerakang Village has not been fully successful as a whole. This is due to the construction that was not completed in the allotted time. This is due to the recipient's lack of awareness to work together in building, still beneficiaries are still working on the building individually. In addition to the lack of importance of implementers in assisting. If the implementation can be carried out firmly in supervising the BSPS in Paccerakang Village, it will greatly affect the timeliness given in completing the settlement.

**Keywords: Implementation, BSPS, Low-Income Communit**



## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan masalah yang dimana belum mampu diselesaikan saat ini. Kemiskinan merupakan unsur yang akan menentukan maju atau tidaknya suatu negara. Kemiskinan membuat orang tak bisa memenuhi kebutuhan pokok dirinya serta keluarganya yang meliputi keperluan mental, fisik, serta sosial. Jika keperluan pokok tidak terpenuhi, maka dapat berpengaruh pada terlantarnya kerabat serta akan menjadi tunawisma.

Adapun karakteristik utama dari kemiskinan adalah rendahnya dan terbatasnya dalam menangani kebutuhan baik pakaian, makanan, tempat tinggal dan pendidikan, dan juga kesehatan. Seperti yang dikemukakan oleh Niemiets (2011) dalam Maipita (2014) kemiskinan merupakan tidak mampunya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok terdiri dari pangan, sandang, papan dan juga obat-obatan. Kemiskinan adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesejahteraan didalam negara, apabila semakin tinggi persentasi jumlah penduduk miskin yang terdapat disuatu negara maka semakin kecil pulah tingkat kesejahteraan di negara tersebut.

Secara umum, kemiskinan disebabkan karena setiap individu memiliki kebutuhan yang berbeda, adanya perbedaan kepemilikan aset yang mengarah pada munculnya distribusi yang timpang. Dimana masalah ini dilihat dari sebagian besar masyarakat pemilik SDA terbatas, selain itu dipengaruhi oleh SDM

ditingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah akan menyebabkan kegagalan untuk membina diri mereka sendiri dan juga mempengaruhi peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang akan mempengaruhi tingkat pengangguran yang tinggi. Tingginya angka pengangguran di suatu negara akan menimbulkan kemelaratan serta masalah ekonomi dan politik negara yang kurang mendorong perekonomian rakyat. Proses ini berjalan secara merata dan terhubung satu sama lain, yang akhirnya akan terfokus pada pelemahan masyarakat miskin. Jika masalah ini tidak segera ditangani, akan memperburuk keadaan kemiskinan. Oleh karena itu pemerintah telah berupaya dalam menanggulangi kemiskinan di Indonesia yaitu dengan mencanangkan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang di atur didalam PERMEN Pekerjaan Umum dan Peumahan Rakyat No.07/PRT/M/2018 Mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

BSPS atau di sebut juga dengan “Bedah Rumah” merupakan program yang dimana diusung oleh Kementerian PUPR. BSPS merupakan bantuan pemerintah dimana diasosiasikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) untuk melakukan pembangunan rumah layak huni. MBR adalah masyarakat dimana memiliki daya beli terbatas sehingga harus mendapatkan bantuan pemerintah agar mendapatkan hunian yang layak.

Sebagai kebutuhan pokok manusia, rumah adalah syarat untuk memperoleh kesejahteraan dan selanjutnya untuk membina keluarga, dan telah menjadi kewajiban negara untuk mengembangkan penduduknya untuk membantu MBR agar dapat memenuhi kebutuhan rumah mereka. Menurut UU No 1 Tahun

2011 mengenai Perumahan dan Kawasan Permukiman, dinyatakan bahwa Kawasan perumahan dan pemukiman adalah suatu struktur terpadu yang mencakup mencakup pembinaan, pelaksanaan penginapan, pelaksanaan kawasan permukiman, dukungan dan perbaikan, penangkalan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan pemukiman kumuh, pemberian dana dan pembiayaan dan juga peran masyarakat. Penyelenggaraan kawasan permukiman dilaksanakan agar dapat melengkapi hak rakyat untuk mendapatkan hunian layak didalam lingkungan sehat, serasi, aman, serta teratur. Selanjutnya Undang-Undang NO.1 Tahun 2011, menjelaskan bahwa perumahan dan kawasan pemukiman merupakan salah satu bentuk tanggungjawab negara dalam rangka mensejahterakan masyarakatnya agar mampu memiliki tempat tinggal layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia.

Rumah adalah struktur atau bangunan yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak, metode untuk mendorong sebuah keluarga, kesan rasa hormat dan nilai dari penghuninya, serta sumber daya bagi pemiliknya. Melalui penelitian terdahulu oleh Eny Hikmawati dan Tri Gutomo (2016) rumah adalah salah satu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi bagi setiap orang, jika kebutuhan rumah tidak terpenuhi akan menyebabkan pada keterlantaran anggota keluarga dan menyebabkan tunawisma. Kehadiran rumah memegang peranan penting bagi keberadaan manusia, baik secara terpisah maupun dalam keluarga yang terdiri dari segi fisik, mental dan sosial. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai tempat perlindungan dari panasnya sinar matahari dan hujan,

risiko penyakit, dan serangan makhluk hidup. Rumah sebagai tempat perlindungan harus memenuhi kebutuhan aktual, khususnya kokoh, terlindungi dan sehat, secara intelektual untuk memuaskan rasa kenyamanan dan martabat, dan menjaga keamanan setiap kerabat. Sementara itu, dalam pelaksanaan harus berpedoman pada peraturan serta kebijakan yang diterapkan agar dapat mencapai tujuan dari kebijakan sehingga dapat menjawab masalah kebutuhan perumahan yang layak agar tepat sasaran.

Sebagaimana ditegaskan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab IV pasal 11 bahwa syarat untuk mendapatkan bantuan BSPS adalah masyarakat yang:

1. Perseorangan penerima BSPS merupakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
  - b. Memiliki dan menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang sah;
  - c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
  - d. Belum pernah memperoleh bantuan BSPS bantuan pemerintah untuk program pemerumahan;
  - e. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum daerah provinsi;
  - f. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
2. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:



- a. Tidak dalam sengketa;
  - b. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah
3. KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. Terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota;
  - b. Anggota KPB paling banyak 20 orang;
  - c. Anggota KPB bertempat tinggal di desa/keseluruhan yang sama;
  - d. Diterapkan oleh kepala desa/lura.

Di kabupaten luwu sendiri khususnya di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan telah melaksanakan Program BSPS. BSPS ini merupakan bentuk kebijakan dari pemerintah melalui Dinas PUPR dalam upaya meringankan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah tapi tergolong dalam rumah tidak layak huni (RTLH). Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang mulai berjalan sejak tahun 2019. Bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berupa uang dan barang.

Di Desa Paccerakang sebagian besar masyarakatnya bekerja sebagai petani. Namun hasil yang mereka dapat tidak cukup untuk memenuhi dari banyaknya kebutuhan mereka terlebih mengharapkan rumah yang layak huni. Selain itu sebagian masyarakat masih ada yang belum memiliki rumah atau rumah mereka tidak masuk dalam kriteria layak. Hal ini tentunya menjadi perhatian dari pemerintah daerah dalam penanggulangan kemiskinan tersebut. Dengan adanya program unggulan dari pemerintah terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan

Swadaya (BSPS) masyarakat yang berada di Desa Paccerakang mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Akan tetapi berdasarkan hasil observasi saya dan juga wawancara dengan beberapa masyarakat di Desa Paccerakang yang mengeluhkan mengenai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yang tidak tepat sasaran. Dimana dalam penyaluran bantuan BSPS ada beberapa masyarakat yang mampu namun diberikan bantuan. Hal ini dilihat dari kriteria rumah yang dimiliki masih layak dibandingkan dengan rumah lainnya, sedangkan ada beberapa masyarakat yang memiliki rumah yang sudah tidak layak huni tapi tidak mendapat bantuan dari pemerintah. Ini terlihat dari keadaan konstruksi rumah yang tidak layak yang ada di Desa Paccerakang yaitu terlihat dari dinding bangunan yang tidak cukup, atap yang bocor, serta penataan ruangan yang tidak sesuai dengan standar ideal yang ada. Namun berdasarkan persyaratan yang telah ditetapkan telah memenuhi. Hal ini tentunya menjadi persoalan yang perlu dicarikan jawabannya agar tidak menjadi penyebab munculnya isu-isu baru di tengah-tengah masyarakat.

### **B. Rumusan Masalah dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti membatasi masalah agar pembahasan mengarah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Oleh karena itu, fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Paccerakang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu yang tepat sasaran.

Berdasarkan landasan diatas, sehingga ditarik beberapa permasalahan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimanakah proses pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu?
2. Bagaimanakah ketercapaian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu?

### **C. Tujuan Penelitian**

Melalui rumusan masalah diatas dapat dikemukakan tujuan penelitian, yaitu:

1. Agar memahami bagaimana proses pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu
2. Agar memahami pencapaian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka manfaat penulisan ini mengacu pada dua aspek yaitu:

1. Manfaat Teoritis, dapat bermanfaat sebagai bahan acuan bagi transformasi ilmu, terkhususnya ilmu administrasi negara mengenai Implementasi Program BPS sebagai upaya meringankan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni.

## 2. Manfaat praktis

### a. Bagi peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan data dan menambah pemahaman bagi penulis selanjutnya tentang Implementasi Program BSPS sebagai upaya meringankan masyarakat berpenghasilan rendah untuk memiliki rumah yang layak huni.

### b. Bagi pembaca

Penulisan ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi tentang Implementasi Program BPS meringankan masyarakat berpenghasilan rendah berhak mendapatkan bantuan program ini.

**BOSOWA**



## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Implementasi Kebijakan**

##### **1. Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Implementasi merupakan suatu kegiatan dalam sebuah rancangan yang telah disusun secara matang dan terperinci yang dibuat dengan tujuan untuk menanggulangi permasalahan yang terjadi. Menurut Theresia (2014:9-10) implementasi adalah tahapan penting suatu program yang telah diterapkan dan harus dilaksanakan agar tercapai tujuan yang diinginkan serta dapat merasakan dampaknya. Implementasi kebijakan baru dapat dilakukan apabila tujuan-tujuan kebijakan telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut. Menurut Afan Gaffar (2009: 295) implementasi adalah rangkaian aktivitas untuk menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasi adalah proses kebijakan yang paling kompleks dan sangat menentukan keberhasilan kebijakan yang ditetapkan. Selanjutnya menurut Van Meter dan Van Horn dalam Wahab (2006:65) implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik individu-individu maupun kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah direncanakan dalam keputusan kebijakan.

Menurut Merille S. Grindle dalam wahab (2008:180) menjelaskan implementasi adalah aspek yang sangat penting dari keseluruhan kebijakan.

Disamping itu Grindle dalam Winarno menjelaskan secara umum tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan dapat terealisasi sebagai dampak dari kegiatan pemerintah. Adapun keberhasilan dari implementasi kebijakan menurut Grindle dalam Subarsosno (2011:93) dipengaruhi oleh 2 variabel yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*content of implementation*). Variabel isi kebijakan mencakup: sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan, jenis manfaat yang diterima oleh kelompok sasaran, sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan, apakah letak sebuah program sudah tepat, apakah sebuah kebijakan telah menyebutkan implementasinya dengan rinci, dan apakah sebuah program didukung oleh sumber daya yang memadai. Sedangkan variabel lingkungan mencakup: kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat, karakteristik lembaga dan penguasaan, kepatuhan dan daya tangkap.

Berdasarkan penjelasan di atas maka ditarik kesimpulan bahwa dalam mewujudkan keberhasilan suatu implementasi kebijakan, maka suatu kebijakan harus mengacu pada aturan yang telah ditetapkan yang akan dijadikan panduan pelaksanaan dari kebijakan. Selain itu, keberhasilan dari suatu kebijakan dapat dilihat dari dampak yang diperoleh dari masyarakat dan adanya perubahan yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat yang memperoleh kebijakan tersebut.

## **2. Model Implementasi Kebijakan**

Model implementasi kebijakan adalah kerangka dalam menganalisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan

situasi atau kondisi yang terjadi setelah ditetapkan kebijakan. Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Menurut Syukur Abdullah (2007:41) dalam proses implementasi terdapat tiga unsur yaitu:

- a. Adanya program (kebijaksanaan)
- b. Kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan manfaat dari program perubahan dan peningkatan
- c. Unsur pelaksana yang baik organisasi maupun perorangan yang bertanggungjawab dalam pengelolaan pelaksana dan pengawasan dari proses implementasi.

Model-model perumusan kebijakan publik untuk mengkaji proses perumusan kebijakan agar lebih mudah dipahami Menurut Nugroho dalam bukunya *Public Policy* (2017:556), yaitu:

- a. Model kelembagaan (*institutional*)

Model kelembagaan yaitu membuat kebijakan publik merupakan tugas pemerintah. Jadi, apa pun yang dibuat pemerintah dengan cara apa pun adalah kebijakan publik. Model ini mendasarkan kepada fungsi-fungsi kelembagaan dari pemerintah, di setiap sektor dan tingkat, di dalam formulasi kebijakan. Disebutkan Dye yang dikutip Nugroho dalam bukunya *Public Policy* (2017:558), ada tiga hal yang membenarkan pendekatan ini, yaitu bahwa pemerintah memang sah membuat kebijakan publik, fungsi tersebut bersifat universal, dan memang pemerintah memonopoli fungsi pemaksaan (koersi) dalam kehidupan bersama.

b. Model proses (*process*)

Pada model proses para pengikutnya menerima asumsi bahwa politik merupakan sebuah aktivitas sehingga mempunyai proses. Model proses biasanya dimulai dari pendefinisian masalah atau isu kebijakan, analisis permasalahan, merumuskan alternatif, melakukan asesmen alternatif kebijakan dan mengembangkan kriteria evaluasi kinerja, dan kemudian merumuskan kesimpulan. Simpulan ini kemudian dilaksanakan untuk memberikan hasil yang diharapkan. Salah satu model proses adalah model klasik Patton-Savicky, yang banyak menjadi acuan dari sebagian besar pengambil kebijakan. Di sini dianjurkan agar sidang pembaca mencermati proses formulasi kebijakan seperti itu karena pada dasarnya memang formulasi kebijakan seperti itu apa pun modelnya.

c. Model kelompok (*group*)

Model kelompok mengandaikan kebijakan sebagai titik keseimbangan (*equilibrium*). Inti gagasan adalah interaksi di dalam kelompok akan menghasilkan keseimbangan, dan keseimbangan adalah terbaik. Di sini individu di dalam kelompok-kelompok kepentingan berinteraksi secara formal maupun informal, secara langsung atau melalui media massa menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan publik yang diperlukan.

d. Model elite (*elite*)

Model teori elite berkembang dari teori politik elite-massa yang melandaskan diri pada asumsi bahwa di dalam setiap masyarakat pasti terdapat dua kelompok, yaitu pemegang kekuasaan atau elite dan yang tidak memiliki

kekuasaan atau massa. Teori ini mengembangkan diri kepada kenyataan bahwa sedemokratis apa pun, selalu ada bias dalam formulasi kebijakan, karena pada akhirnya kebijakan-kebijakan yang dilahirkan merupakan preferensi politik dari para elite-tidak lebih.

e. Model rasionalis (*rational*)

Model rasionalis dikenal sebagai “rasional komperhensif”, yang mengedepankan gagasan bahwa kebijakan publik sebagai *maximum social gain*, yang berarti pemerintah sebagai pembuat kebijakan harus memilih kebijakan yang memberikan manfaat optimum bagi masyarakat. Model ini dikembangkan dari model cost-benefit analysis, sebuah model yang diawali di *US Corps and Engine* (semacam Departemen Pekerjaan Umum) pada tahun 1930-an dalam rangka membangun bendungan dan jembatan. Tidak dipungkiri, model ini adalah model yang paling banyak diikuti dalam paraktek formulasi kebijakan publik di seluruh dunia.

f. Model inkremental (*incremental*)

Model incremental merupakan kritik terhadap model rasional. Dikatakannya, para pembuat kebijakan tidak pernah melakukan proses seperti yang diisyaratkan oleh pendekatan rasional karena mereka tidak memiliki cukup waktu, intelektual, maupun biaya, ada kekhawatiran muncul dampak yang tidak diinginkan akibat kebijakan yang belum pernah dibuat sebelumnya, adanya hasil-hasil dari kebijakan sebelumnya yang harus dipertahankan, dan menghindari konflik.

g. Model teori permainan (*game theory*)

Model teori permainan adalah model yang sangat abstrak dan deduktif di dalam formulasi kebijakan. Sesungguhnya model ini mendasarkan kepada formulasi kebijakan yang rasional namun di dalam kondisi kompetisi di mana tingkat keberhasilan kebijakan tidak lagi hanya ditentukan oleh aktor pembuat kebijakan, namun juga aktor-aktor lain. Salah satu contoh adalah proses pemulihan ekonomi Indonesia.

h. Model pilihan publik (*public choice*)

Model pilihan publik juga disebut sebagai *social choice* atau juga *rational choice*, yang intinya melihat kebijakan sebagai sebuah proses formulasi keputusan kolektif dari individu-individu yang berkepentingan atas keputusan tersebut. Akar kebijakan ini sendiri berakar dari teori ekonomi pilihan publik (*economic of public choice*) yang mengandaikan bahwa manusia adalah *homo economicus* yang memiliki kepentingan-kepentingan yang harus dipuaskan.

i. Model sistem (*system*)

Model sistem mengandaikan bahwa kebijakan merupakan hasil atau *output* dari sistem (politik). Seperti dipelajari dari ilmu politik, maka sistem politik terdiri *input*, *throughput*, dan *output*. Model ini merupakan model paling sederhana namun komperhensif, meski tidak memadai lagi untuk dipergunakan sebagai landasan pengambilan keputusan atau formulasi kebijakan publik.

j. Model pengamatan terpadu (*mixed scanning*)

Model ini adalah upaya menggabungkan antara model rasional dengan model inkremental. Inisiatornya adalah pakar sosiolog organisasi, Amitai Atzioni

pada tahun 1967. Ia memperkenalkan model ini sebagai suatu pendekatan terhadap formulasi keputusan-keputusan pokok dan inkremental, menetapkan proses-proses formulasi kebijakan pokok dan urusan tinggi yang menentukan petunjuk-petunjuk dasar, proses-proses, yang mempersiapkan keputusan-keputusan pokok, dan menjalankannya setelah keputusan itu tercapai. Model ini ibaratnya pendekatan dengan dua kamera: kamera dengan *wide angle* untuk melihat keseluruhan, dan kamera dengan *zoom* untuk melihat detailnya.

k. Model demokratis

Model demokratis berkembang di negara-negara yang baru saja mengalami transisi ke demokrasi, seperti Indonesia. Gambaran sederhananya dapat diandaikan dalam sebuah proses pengambilan keputusan demokratis dalam teori politik. Model ini biasanya diperkaitkan dengan implementasi *good governance* bagi pemerintah yang mengamanatkan agar dalam membuat kebijakan, para konstituen dan pemanfaat (*beneficiaries*) diakomodasi keberadaannya. Model yang dekat dengan model “pilihan publik” ini baik, namun kurang efektif dalam mengatasi masalah-masalah yang kritis, darurat, dan dalam kelangkaan sumber daya. Namun, jika dapat dilaksanakan model ini sangat efektif dalam implementasiannya, karena setiap pihak mempunyai kewajiban untuk ikut serta mencapai keberhasilan kebijakan, karena setiap pihak bertanggung jawab atas kebijakan yang dirumuskan.

l. Model strategis

Meskipun disebut “strategis”, pendekatan ini tidak mengatakan bahwa pendekatan lain “tidak strategis”. Intinya adalah bahwa pendekatan ini



menggunakan rumusan runtutan perumusan strategi sebagai basis perumusan kebijakan.

m. Model deliberative

Setiap kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah harus merupakan keputusan dari publik yang menjadi pengguna. Proses formulasi kebijakan publik dengan demikian melibatkan publik melalui kelompok-kelompok kepentingan. Secara umum, ini adalah konsep formulasi kebijakan publik yang paling demokratis karena memberi ruang yang luas kepada publik untuk berkontribusi pilihan-pilihannya kepada pemerintah sebelum diambil keputusan.

n. Model keranjang sampah (*garbage can*)

Model keranjang sampah adalah model kebijakan yang paling sulit dipertanggungjawabkan kebaikannya, tetapi paling banyak digunakan dan dilaksanakan oleh hampir semua negara berkembang, tidak terkecuali Indonesia. Jadi, ada keinginan mempunyai kebijakan tertentu, yang berasal dari perasaan pemegang kekuasaan politik eksekutif, dan untuk itu ia mencari-cari penyebab untuk membenarkan keinginannya.

Menurut Donald Van Meter dan Carl Van Horn proses implementasi kebijakan akan berbedah-bedah sesuai dengan sifat kebijakan yang dilaksanakan. Van Meter dan Van Horn mengatakan ada beberapa karakteristik dalam proses implementasi kebijakan yaitu:

- a. Proses implementasi yang dipengaruhi oleh sejauh mana kebijakan menyimpang dari kebijakan sebelumnya.

- b. Proses implementasi akan dipengaruhi oleh sejumlah perubahan organisasi yang diperlukan.

Teori Proses Implementasi Kebijakan menurut Van Meter dan Horn dalam Agostiono (2010) yaitu:

- a. Ukuran dan tujuan kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dan diukur karena implementasi tidak dapat berhasil bila tujuan-tujuan itu tidak dipertimbangkan

- b. Sumber-sumber kebijakan

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

- c. Komunikasi antar organisasi

Koordinasi merupakan mekanisme dalam implementasi kebijakan publik. Jika koordinasi komunikasi baik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka implementasi akan berjalan secara efektif.

- d. Karakteristik badan-badan pelaksana

Karakteristik badan-badan pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan.

- e. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik.

Variabel ini mencakup sumber daya ekonomi dimana, lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn sejauh mana lingkungan *eksternal* turut mendorong keberhasilan

kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang tidak kondusif dapat menjadi penyebab dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan.

f. Kecenderungan para pelaksana

Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.

### **3. Faktor Pendukung Keberhasilan Implementasi Kebijakan**

Menurut Budi Winarno (2002:102) implementasi kebijakan jika dipandang dalam pengertian luas, adalah alat hukum dimana berbagai aktor organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Menurut teori implementasi kebijakan oleh George Edward III (1980:1), implementasi kebijakan adalah proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan jika tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik maka apa yang menjadi tujuan kebijakan tidak akan tercapai. Begitupun sebaliknya, bagaimanapun baiknya persiapan dan perencanaan implementasi kebijakan, jika kebijakan tidak dirumuskan dengan baik apa yang akan menjadi tujuan kebijakan juga tidak akan tercapai. Oleh karena itu Edward menyatakan ada 4 variabel yang mempengaruhi model implementasi kebijakan yaitu:

a. Komunikasi

Menurut Arifin (2000:5) komunikasi adalah faktor yang sangat penting karena komunikasi berhubungan dengan penyampaian informasi, ide, keterlambiran, peraturan yang menggunakan sarana kepada pihak yang menerimanya. Implementasi kebijakan akan berjalan secara efektif jika dalam keputusan pelaksanaan mereka dapat mengetahui apa yang harus mereka lakukan.

Menurut Edward ada tiga hal penting yang ada dalam proses komunikasi kebijakan yaitu: transmisi, konsistensi, dan kejelasan.

- 1) Transmisi, adalah seorang pejabat yang mengimplementasikan keputusan harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan suatu perintah untuk pelaksanaannya dikeluarkan.
- 2) Konsistensi, adalah jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif maka perintah-perintah pelaksanaan harus konsisten dan jelas.
- 3) Kejelasan, adalah bahwa petunjuk-petunjuk pelaksanaan kebijakan tidak hanya harus diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

b. Sumber daya

Sumber daya yaitu menunjuk pada setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial, SDM adalah kecukupan baik kualitas maupun implementator yang dapat melingkupi semua kelompok sasaran kebijakan. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas kebijakan yang dibuat.

c. Kecenderungan-kecenderungan atau tingka laku (Disposisi)

Kecenderungan-kecenderungan atau tingka laku adalah merujuk pada karakteristik yang menempel kepada implementor kebijakan. Kecenderungan-kecenderungan para pelaksana kebijakan mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi. Jika para pelaksana bersikap baik terhadap suatu kebijakan tertentu atau adanya dukungan terhadap kebijakan ini maka mereka akan melaksanakan kebijakan sebagaimana yang telah ditetapkan.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi adalah salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah dan juga organisasi organisasi swasta. Menurut Budi Winarno (2002:126:151) birokrasi adalah badan yang secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan, baik itu struktur pemerintah juga oranisasi-oeganisasi swasta.

Faktor keberhasilan implementasi menurut Rifley dan Franklin dalam Sujianto (2008:46) yaitu:

- a. Kejelasan tujuan-tujuan program ditingkat consensus diantara pelaksana atas tujuan-tujuan tersebut.
- b. Tingkat perubahan dari kebiasaan-kebiasaan lama yang dikehendaki program.
- c. Tipe orang yang memperoleh manfaat dari kebijakan.

**B. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

**1. Pengertian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Rumah adalah kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai cerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan taraf hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa.

Perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang berperan dalam menjaga kelangsungan kehidupannya. Dimana hak atas perumahan adalah hak setiap orang untuk memperoleh secara berkelanjutan rumah yang layak huni. Layak dalam hal ini meliputi jaminan keamanan dan hukum, mudah didapat dari segi keuangan, mendukung untuk pelaksanaan aktifitas hidup sehari-hari, atau hal lain yang membuat kehidupan penghuninya bermartabat sebagai manusia. Selanjutnya pengertian lain dari rumah layak huni adalah tempat tinggal yang nyaman, terlindung dari sengatan matahari, guyuran air hujan, dan debu. Namun, karena keterbatasan ekonomi tidak semua orang khususnya masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR) mampu untuk membangun rumah yang layak huni. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) yang dijalankan untuk memberdayakan masyarakat, terutama masyarakat yang berpenghasilan rendah agar mampu meningkatkan kualitas tempat tinggal yang layak dan lingkungan yang sehat dan aman.

Dengan terpenuhinya salah satu kebutuhan dasar berupa rumah yang layak huni, diharapkan tercapai ketahanan keluarga. Rumah yang baik adalah rumah yang sehat atau sering disebut layak huni, yang harus diupayakan keberadaannya, kebutuhan rumah yang layak huni diharapkan sebagai upaya mencapai ketahanan

keluarga, sebaliknya jika tidak terpenuhi akan menimbulkan permasalahan, seperti keterlantaraan ataupun permasalahan kesejahteraan sosial keluarga (Hikmawati dan Gutomo, 2016). Rumah merupakan kebutuhan dasar manusia yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga. Pada hakikatnya setiap warga masyarakat membutuhkan perumahan yang layak huni, namun dalam kenyataannya pemenuhan kebutuhan rumah layak huni tersebut menjadi masalah bagi sebagian masyarakat (Sulistyo, Mudji, 2013).

Memiliki rumah yang layak huni adalah hak setiap warga Negara tanpa kecuali, ini yang telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 maupun aturan Perundang-undangan lainnya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H Ayat 1 menyatakan dengan tegas yaitu Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Oleh karena itu untuk menanggulangi kemiskinan di Indonesia dalam pemenuhan kebutuhan rumah yang layak, pemerintah telah mengulirkan kebijakan terkait Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah.

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah program yang lahir dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan bantuan dari pemerintah kepada masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendorong dan meningkatkan keswadayaan dalam peningkatan kualitas rumah dan pembangunan rumah yang baru. Perumahan swadaya merupakan rumah atau perumahan yang dibangun atas



upaya masyarakat, baik secara sendiri atau kelompok, yang meliputi perbaikan, perluasan atau pembangunan rumah baru. Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah fasilitas pemerintah dengan sejumlah bantuan yang diberikan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam membangun rumah yang layak huni. Sementara itu, kekuatan pembangunannya adalah membangun dan merenovasi rumah karena inisiatif dan usaha masyarakat sesuai dengan individu atau kelompok, termasuk perbaikan, pemulihan, pembangunan rumah baru dan lingkungan. Menurut Astuti program bedah rumah merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar terutama perumahan sebagai tempat tinggal, melalui peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan perbaikan atau rehabilitasi rumah tidak layak huni (bedah rumah), sehingga keluarga miskin dapat menempati rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera (Astuti, 2019)

## **2. Tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya yang di gagas oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Peumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia yang terdiri atas perbaikan, pemugaran/perluasan atau pembangunan rumah baru beserta lingkungan. Adapun tujuan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya oleh Menteri PUPR adalah untuk meningkatkan kualitas rumah dan pembangunan baru, dilihat dari kualitas atap, lantai, dan dinding rumah untuk memenuhi kesehatan, keselamatan, dan kenyamanan.

Tujuan Bantuan Simulan Perumahan Swadaya adalah untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) agar mampu meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah

yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman serta meringankan beban masyarakat yang kurang mampu. Selain itu tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar terutama perumahan sebagai tempat tinggal, melalui peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat dan perbaikan/rehabilitas rumah tidak layak huni, sehingga keluarga miskin dapat menempati rumah yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan sejahtera.

Selain itu, tujuan Program Bantuan Simulan Perumahan Swadaya yang ingin di capai dari pelaksanaan program ini yaitu:

- a. Percepatan upatan upaya penanggukan kemiskinn melalui upaya peningkatan swadaya, prakaras dan peran serta masyarakat dalam pembangunan.
- b. Meningkatkan kapasitas penduduk miskin.
- c. Pengembangan nilai budaya gotong royong dan kesawadayan.
- d. Terpenuhinya kebutuhan papan/perumahan yang layak huni dan sehat bagi masyarakat miskin.
- e. Meningkatnya drajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan prilaku hidup bersih dan sehat.

### **3. Kriteria dan Persyaratan Bantuan Perumahan Swadaya (BSPS)**

Adapun kriteria dan persyaratan masyarakat miskin yang berhak mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) menurut Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Bab IV pasal 11 yaitu:

1. Perseorangan penerima BSPS merupakan MPR yang memenuhi persyaratan:

- a. Warga negara Indonesia yang sudah berkeluarga;
  - b. Memiliki atau menguasai tanah dengan bukti kepemilikan yang sah;
  - c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati satu-satunya rumah dengan kondisi tidak layak huni;
  - d. Belum pernah memperoleh bantuan BPS bantuan pemerintah untuk program pemerumahan;
  - e. Berpenghasilan paling banyak senilai upah minimum daerah provinsi;
  - f. Bersedia berswadaya dan membentuk KPB dengan pernyataan tanggung renteng.
2. Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan:
- a. Tidak dalam sengketa; dan
  - b. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah
3. KPB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus memenuhi persyaratan:
- a. Terdiri atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap anggota, bendahara merangkap anggota;
  - b. Anggota KPB paling banyak 20 orang;
  - c. Anggota KPB bertempat tinggal di desa/keseluruhan yang sama;
  - d. Diterapkan oleh kepala desa/lurah.

#### **4. Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)**

Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) merupakan masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah

untuk memperoleh rumah ( Pasal 1 Angka 24 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman).

Menurut Soemarwanto (2014) masyarakat berpenghasilan rendah adalah masyarakat yang tercermin dari kondisi sosial ekonomi dalam kehidupan dan ditunjukkan dengan kondisi perumahan masyarakat yang ada diberbagai wilayah, baik yang ada di pedesaan maupun di perkotaan yang masih dalam kondisi tidak layak.

### **C. Kemiskinan**

#### **1. Pengertian Kemiskinan**

Kemiskinan adalah kondisi ketidakmampuan secara ekonomi untuk memenuhi standar hidup rata-rata masyarakat disuatu daerah. Kondisi ketidakmampuan ini ditandai dengan rendahnya kemampuan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti kebutuhan sandang (pakaian), pangan (makanan), dan papan (tempat tinggal). Kemiskinan faktor yang sangat menentukan maju tidaknya suatu negara. Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Menurut para ahli kemiskinan itu bersifat multidimensional. Artinya, karena kebutuhan manusia itu macam-macam, maka kemiskinan pun memiliki banyak aspek. Dilihat dari kebijakan umum, maka kemiskinan meliputi aspek primer yang berupa miskin akan aset, organisasi sosial politik dan pengetahuan juga keterampilan. Dan aspek sekunder yang berupa miskin akan jaringan sosial, sumber-sumber keuangan dan informasi. Dimensi-dimensi kemiskinan tersebut

termanifestasikan dalam bentuk kekurangan gizi, air, perumahan yang sehat, perawatan kesehatan yang kurang baik, dan tingkat pendidikan yang rendah.

Marianti dan Munawar (2006) berpendapat bahwa kemiskinan merupakan fenomena multidimensi, didefinisikan dan diukur dalam banyak cara. Dalam banyak kasus, kemiskinan telah diukur dengan determinologi kesejahteraan ekonomi, seperti pendapatan dan konsumsi seorang dikatakan miskin jika berada di bawah tingkat kesejahteraan minimum tertentu yang telah disepakati.

Menurut Nugroho dan Dahuri, kemiskinan adalah kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau sekelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena sebab-sebab natural, cultural, dan struktural.

Menurut Niemiets (2011) dalam Maipita (2014), kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk membeli barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, papan, dan obat-obatan. Selanjutnya menurut Kuncoro (2000) dalam Tyas (2016) kebutuhan adalah ketidakberdayaan untuk memenuhi pedoman aturan hidup. Oleh karena itu, cenderung beralasan bahwa kemelaratan adalah suatu kondisi di mana seseorang atau daerah tidak dapat mengusahakan kehidupan yang unggul atau dapat dianggap tidak mampu untuk mengusahakan kehidupan yang unggul.

## **2. Bentuk dan Jenis Kemiskinan**

Kemiskinan mempunyai makna yang luas dan memang tidaklah mudah untuk mengukurnya. Oleh karena itu berikut ini akan dijelaskan macam-macam

ukuran kemiskinan yang umum digunakan, yaitu sebagai berikut: kemiskinan absolut, kemiskinan relatif, kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural.

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh negara. Atau bisa juga diartikan seperti keadaan individu yang penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Konsep ini memberi arti bahwa kemiskinan absolut berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar minimum agar seorang dapat hidup layak. Jika seorang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimumnya, maka orang tersebut dikatajkan miskin. Contoh kemiskinan absolut yaitu tidak dapat memenuhi kebutuhan makanan, pendidikan, penghasilan tidak memenuhi standar kebutuhan, tidak memiliki pekerjaan yang tetap dll.

b. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata sehingga belum dapat menjangkau seluruh masyarakat. Oleh sebab itu, di sebagian daerah ada penduduknya yang memiliki ketimpangan pendapatan. Meskipun kondisi seorang penduduk sudah berada di atas batas garis kemiskinan, tetapi tetap terlihat miskin karena rata-rata pendapatan penduduk daerah tersebut lebih tinggi. Maka dari itu, kemiskinan jenis ini dinamakan kemiskinan relatif.

Kemiskinan relatif biasanya diperoleh sengan membandingkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dengan kelompok masyarakat berpendapatan

tinggi (kelompok bawah dengan kelompok atas). Pembagian pendapatan masyarakat ini dikelompokkan dalam ukuran desi atau kuantiti.

Menurut suprihatin Guhardja dalam buku pengembangan sumber daya keluarga: bahan pengajaran (1993), kemiskinan relatif adalah bentuk kemiskinan yang disebabkan oleh keadaan lingkungan tempat keluarga tersebut tinggal. Adapun yang termasuk contoh kemiskinan relatif yaitu perbedaan keahlian yang dimiliki orang. Contoh seorang yang bekerja dibidang desain ternyata tidak mempunyai cukup keahlian di bidang desain

c. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang sudah menjadi budaya, baik itu dari nilai-nilai yang diusung, pemikiran, maupun cara kerja yang rendah. Kemiskinan kultural terjadi karena mempunyai rasa pesimis, boros, mementingkan hal yg bersifat aksesoris, keinginan pamer, malas, menundah waktu, tidak punya kepedulian kepada yang lain.

d. Kemiskinan struktural

Kemiskinan struktural sering disebut dengan kemiskinan buatan (man made poverty) baik langsung maupun tidak langsung kemiskinan kategori ini umumnya disebabkan oleh tatanan kelembagaan dan sistem yang diterapkan, seperti sistem politik, ekonomi, keamanan, dan lainnya dan oleh karena itu kondisi sosial ekonomi masyarakat menjadi rendah (underdevelopment) atau mungkin tidak sejahtera.

### **3. Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan**



Berikut ini akan dijelaskan penyebab dari kemiskinan yaitu:

a. Pengangguran

Semakin banyak pengangguran, semakin banyak pula orang-orang miskin yang ada disekitar. Karena pengangguran atau orang yang menganggur tidak bisa mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Padahal kebutuhan setiap manusia itu semakin hari semakin bertambah. Selain itu pengangguran juga menimbulkan dampak yang merugikan bagi masyarakat, yaitu pengangguran dapat menjadikan orang biasa menjadi pencuri, perampok, dan pengemis yang akan meresahkan masyarakat sekitar.

b. Tingkat pendidikan yang rendah

Tidak adanya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan wawasan yang lebih, masyarakat tidak akan mampu memperbaiki hidupnya menjadi lebih baik karena dengan pendidikan masyarakat bisa mengerti dan memahami bagaimana cara untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi kehidupan manusia.

Rendahnya tingkat pendidikan menggiring masyarakat pada kebodohan. “Bodoh” disini bukan berarti secara harfiah dimana jika mereka bersekolah, lalu mereka akan mendapatkan nilai yang jelek. Bukan seperti itu. Namun lebih kepada tidak adanya atau tidak tersedianya akses menuju pendidikan yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka. Misalnya saja, para nelayan mungkin tidak terlalu memerlukan pelajaran fisika, namun pengetahuan mengenai ragam dari hasil laut dapat mendukung mereka di dalam mengoptimalkan pekerjaan.

c. Bencana Alam

Banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan tsunami menyebabkan gagalnya panen para petani, sehingga tidak ada bahan makanan untuk dikonsumsi dan dijual kepada penadah atau koperasi. Kesulitan bahan makanan dan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak dapat terpenuhi.

d. Mental aparat pemerintah dan masyarakat

Secara garis besar, korupsi penyebab utama dari kemiskinan di Indonesia yang sulit untuk dihilangkan. Selama ada pejabat pemerintahan mulai dari tingkat yang paling rendah sampai dengan tingkat pusat yang hanya berpikir untuk memperkaya dirinya saja, maka itu akan membuat Indonesia selalu ada orang-orang yang miskin. Yang menyedihkan lagi bahwa penyebab dari kemiskinan yang satu ini tidak hanya terfokus pada nominal angka yang dikorupsi.

Bedah halnya dengan menurut Kuncoro, adapun faktor penyebab kemiskinan menurutnya yaitu:

- a. Secara makro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang menimbulkan distribusi pendapatan timpang, penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- b. Kemiskinan muncul akibat perbedaan kualitas sumber daya manusia karena kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktivitas juga rendah, upahnyapun rendah.
- c. Kemiskinan muncul sebab perbedaan akses dan modal. Akibat keterbatasan dan ketertinggalan akses manusia mempunyai keterbatasan (bahkan tidak ada) pilihan untuk mengembangkan hidupnya, kecuali menjalankan apa terpaksa

saat ini yang dapat dilakukan (bukan apa yang seharusnya dilakukan). Dengan demikian manusia mempunyai keterbatasan dalam melakukan pilihan, akibatnya potensi manusia untuk mengembangkan hidupnya menjadi terhambat.

#### D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu bertujuan untuk mendapatkan bahan bandingan dan acuan. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini. Maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 1. Penelitian Terdahulu**

NO	Judul	Nama Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Implementasi Program Bedah Rumah Dalam Mewujudkan Rumah Yang Layak Huni di Kabupaten Mojokerto	Nur Aini Widy Astuti	Untuk menstimulan MBR untuk membangun/mempertbaiki rumah masing-masing dengan dana yang diberikan	Terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung program: adanya dasar pelaksana yang jelas, komunikasi yang baik, dukungan dari pelaksana program, adanya itikad dan sikap yang aktif dan sangat kooperatif dari penerima bantuan. Faktor penghambat: Minimnya SDM, penerima bantuan tidak mampu berswadaya, data pendukung lapangan

				tidak sesuai, penerima bantuan tidak konsisten, adanya apriori dari pihak lain, lingkungan yang tidak mendukung, dan pelaksanaan program tidak tepat waktu.
2.	Pengawasan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin Di Desa Semelagi Besar Tahun 2012	Supardi (2016)	Agar proses pengawasan terus dilakukan sehingga masyarakat yang mendapat bantuan program bedah rumah adalah masyarakat yang memang layak untuk dibantu dan mengurangi tindakan penyimpangan.	Pelaksanaan program bedah rumah yang terjadi di Desa Semelagi Besar Tahun 2012 masih belum optimal karena ditemukan tindakan penyimpangan pemahaman mengenai pelaksanaan program bedah rumah untuk masyarakat miskin yang telah dilakukan di Desa Semelagi Besar oleh Pemerintah desa.
3.	Bedah Rumah Sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan	Eny Hikmawati (2015)	Untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Kulonprogo dalam pengentasan kemiskinan melalui Program Bedah Rumah (PBR)	Menunjukkan bahwa PBR yang dilaksanakan di Kabupaten Kulonprogo terbukti berhasil menangani kemiskinan terutama dalam menyediakan rumah layak huni bagi keluarga miskin.

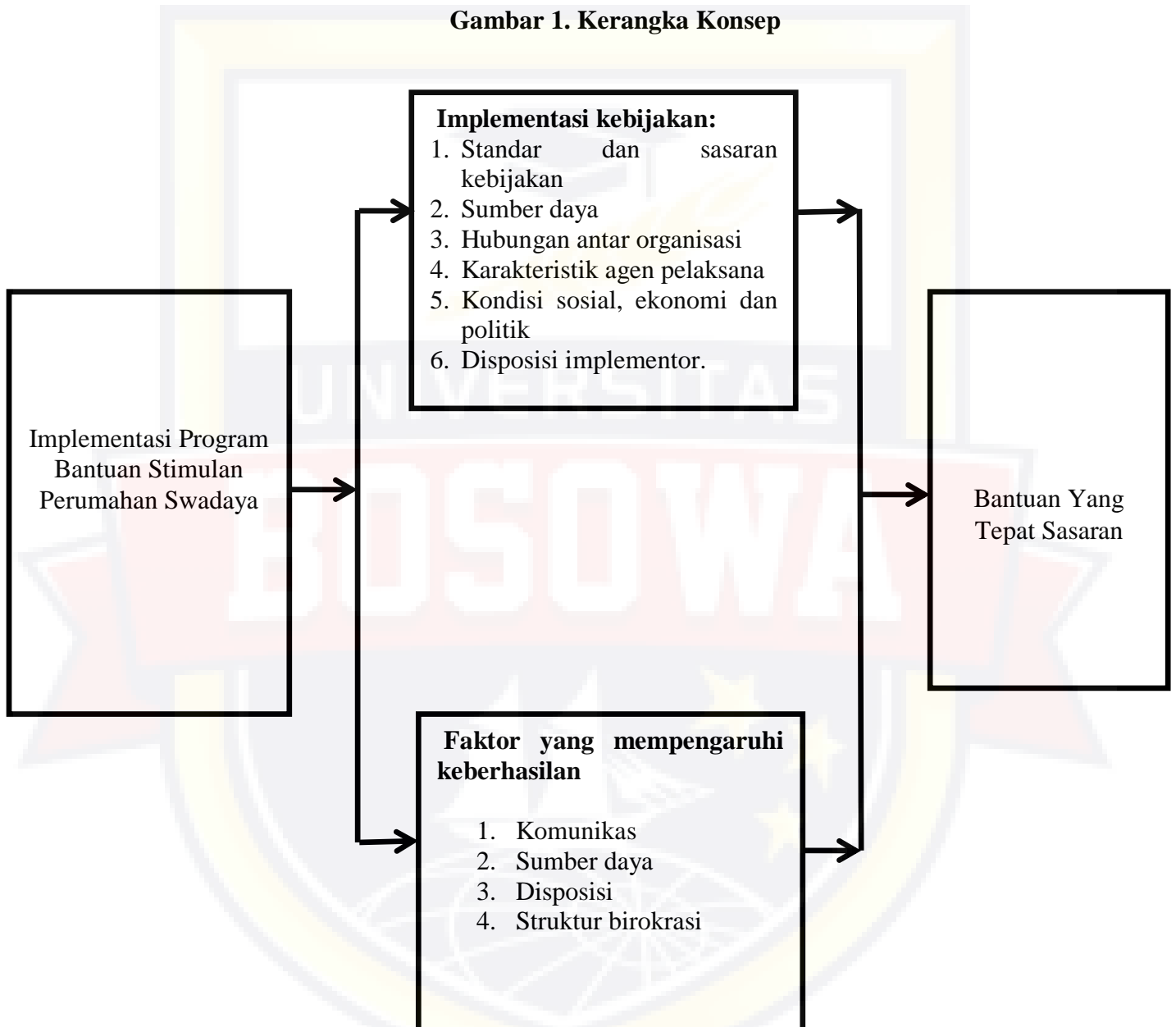
### **E. Kerangka Konsep**

Kerangka Konsep adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan beragam faktor yang telah di indentifikasi sebagai hal yang penting, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kerangka konsep merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman yang lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan penelitian yang akan dilakukan.

**BOSOWA**



Gambar 1. Kerangka Konsep







## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metodologi kualitatif. Metodologi kualitatif adalah proses penelitian yang menghasilkan informasi yang jelas sebagai kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, sehingga data yang dikumpulkan berupa kata dan gambar (bukan angka).

Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu jenis deskriptif yang ditujukan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan akurat mengenai fakta dari fenomena yang sedang diteliti untuk memudahkan peneliti memperoleh informasi yang objektif untuk mengetahui dan memahami Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Adapun lokasi pelaksanaan penelitian di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

#### **C. Informan Penelitian**

Sugiyono (2010) memberikan pandangan bahwa informan penelitian adalah orang-orang yang memahami objek penelitian dan dapat memberikan penjelasan tentang topik penelitian.

Berikut adalah beberapa informan yang nantinya akan diminta keterangan yaitu ada representasi dari pihak:

1. Nama: Galaluddin Banneringgi, ST.  
Agama: Islam  
Jenis Kelamin: Laki-laki  
Pekerjaan: Kepala Desa Paccerakang
2. Nama: Nur Reski (Bidang penanganan BSPS Dinas PERKIM)  
Agama: Islam  
Jenis Kelamin: Perempuan  
Pekerjaan: Tim verifikasi data calon penerima bantuan
3. Nama: Ady Supratman (Fasilitator/ konsultan pendamping)  
Agama: Islam  
Jenis Kelamin: Laki-laki  
Pekerjaan: Tim Fasilitator Lapangan (TFL)
4. Nama: Sri Sulasmi (Fasilitator/ konsultan pendamping)  
Agama: Islam  
Jenis Kelamin: Perempuan  
Pekerjaan: Tim Fasilitator Lapangan (TFL)
5. Nama: Izzah Fitthoniro (Masyarakat Penerima Bantuan)  
Agama: Islam  
Jenis Kelamin: Perempuan  
Pekerjaan: IRT
6. Nama: Natan Barri (Masyarakat Penerima Bantuan)  
Agama: Kristen Protestan  
Jenis Kelamin: Laki-laki

Pekerjaan: Petani

7. Nama: Yawan (Masyarakat Penerima Bantuan)

Agama: Islam

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pekerjaan: Petani

8. Nama: Daud (Masyarakat Penerima Bantuan)

Agama: Kristen Protestan

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pekerjaan: Petani

9. Nama: Agus (Masyarakat Penerima Bantuan)

Agama: Kristen Protestan

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pekerjaan: Petani

10. Nama: Amirulla (Masyarakat Penerima Bantuan)

Agama: Islam

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pekerjaan: Petani

11. Nama: Leni (Masyarakat Penerima Bantuan)

Agama: Kristen Protestan

Jenis Kelamin: Perempuan

Pekerjaan: IRT

12. Nama: Lince (Masyarakat)

Agama: Kristen Protestan

Jenis Kelamin: Perempuan

Pekerjaan: IRT

13. Nama: Dapin (Masyarakat)

Agama: Kristen Protestan

Jenis Kelamin: Laki-laki

Pekerjaan: Petani

#### **D. Fokus Penelitian**

Titik fokus penelitian ini dimaksudkan agar dapat membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian untuk memilih informasi mana yang relevan dan informasi mana yang tidak relevan (Moleong, 2010). Hambatan dalam penelitian ini tergantung pada urgensi masalah yang dialami dalam penelitian ini. Berdasarkan dasar permasalahan di atas, maka fokus kajian ini adalah pelaksanaan Program Bantuan Stimulant Perumahan Swadaya (BSPS).

#### **E. Instrumen Penelitian**

Upaya untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan tujuan penelitian, instrumen utama penelitian yang mengambil bagian penting didalam Penelitian ini adalah peneliti sendiri, jadi peneliti langsung menyaksikan secara langsung apa yang terjadi. Setelah titik fokus penelitian menjadi jelas, bisa jadi instrumen penelitian dibuat dengan cara yang sederhana seperti yang diharapkan untuk melengkapi dan membandingkan informasi yang ditemui berdasarkan observasi dan juga wawancara.

Adapun intrumen-instrumen dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Key instrumen, yaitu peneliti sendiri yang berperan sebagai alat utama dalam penelitian.
2. Instrumen lainnya yaitu: pedoman wawancara, alat perekam wawancara, dan alat pengambilan gambar (kamera foto dan video).

#### **F. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, yaitu data yang ditemukan langsung oleh peneliti dengan turun langsung ke objek dalam hal ini melakukan wawancara dan observasi terhadap implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.
2. Data Sekunder, adalah data pelengkap yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku, jurnal, serta laporan dari mana saja yang sifatnya relevan yang berhubungan dengan Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Keberadaan dokumen sekunder ini adalah untuk menjadi landasan yang nantinya menguatkan kerangka pemikiran terkait hasil penelitian.

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

1. Wawancara

Wawancara merupakan metode yang digunakan untuk mendapatkan dan mengumpulkan data melalui tanya jawab dengan sumber yang dianggap

tahu banyak tentang objek dan masalah penelitian. Dimana peneliti mengajukan pertanyaan kepada narasumber untuk mendapat informasi terkait dengan masalah yang akan diteliti.

Teknik wawancara yang peneliti gunakan yaitu terdiri atas dua yang pertama, wawancara terstruktur, adalah wawancara dengan menggunakan format tertulis yang telah disiapkan sebelumnya berupa uraian pertanyaan yang berhubungan dengan pokok permasalahan dalam penelitian. Kedua, wawancara bebas yang mendalam terkait fenomena yang akan diteliti melalui pertanyaan yang sifatnya tidak terstruktur dengan menggunakan pedoman wawancara, buku catatan, dan alat rekam yang digunakan untuk merekam dan kamera untuk mengambil gambar. Wawancara tidak terstruktur adalah mengacu pada wawancara dimana pertanyaan yang akan diajukan kepada informan tidak buat sebelumnya.

## 2. Observasi

Observasi yaitu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan pengamatan secara langsung terhadap objek dari penelitian dan mencatat secara sistematis tentang permasalahan yang akan di teliti. Dalam hal ini peneliti turun langsung ke lokasi penelitian dengan maksud untuk mendapat data terkait Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah jenis tindakan dalam memberikan laporan yang berbeda dengan menggunakan bukti yang akurat berdasarkan catatan dari sumber yang berbeda. Dokumentasi dapat dilakukan dengan mencari informasi melalui sumber yang berbeda, misalnya catatan, jurnal, buku, transkrip dll. Untuk situasi ini, peneliti mengumpulkan informasi sebagai arsip sehubungan dengan pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.

#### **H. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Oleh karena itu, analisis data diselesaikan selama pengumpulan informasi, dan setelah pengumpulan informasi untuk jangka waktu tertentu. Informasi yang di analisis adalah kata, kalimat, dan peristiwa/kejadian. Menurut Sugiyono (2010:345) terdapat tiga model dalam analisis data yaitu reduksi data, penyajian data, serta verifikasi atau penarikan kesimpulan

##### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah penataan kembali, mengelolah, dan membuang informasi yang dianggap tidak penting sehingga data tersebut dapat menyampaikan informasi yang jelas dan mempermudah dalam menarik kesimpulan. Reduksi data berarti merangkun, memilih hal-hal yang signifikan, memusatkan pada hal-hal yang signifikan. Selain itu, data yang direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan memudahkan peneliti untuk

mengumpulkan lebih banyak data, dan mencarinya saat diperlukan (Sugiyono, 2007).

## 2. Penyajian Data

Penyajian data berupa penggambaran singkat, diagram, hubungan antar kategori dan semacamnya. Yang paling sering digunakan untuk memperkenalkan informasi dalam penelitian kualitatif adalah teks naratif (Sugiyono, 2017). Untuk situasi ini peneliti akan memperkenalkan informasi dalam bentuk teks, untuk menjelaskan hasil penelitian agar dapat membantu dengan memanfaatkan tabel atau gambar.

## 3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah suatu cara untuk mendapatkan kepastian apakah suatu informasi dapat diandalkan validitasnya atau tidak. Dalam verifikasi data, perlu diberikan keabsahan sumber informasi dan tingkat objektivitas dan hubungan antara informasi yang dimulai dengan satu sumber kemudian ke sumber berikutnya, dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan. Menurut Sugiyono (2018: 252-253) kesimpulan pada penelitian kualitatif dapat menjawab rencana masalah yang telah terbentuk, namun mungkin juga tidak, dengan alasan seperti yang telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah masih sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan.

### I. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data digunakan agar dapat memberikan bukti apakah penelitian yang dilakukan merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang didapat Sugiono (2007: 270) menjelaskan bahwa uji keabsahan data



dalam penelitian kualitatif yaitu uji kredibilitas (*credibility*), uji tranferabilitas (*transferability*), uji dependabilitas (*dependability*), dan uji obyektivitas (*confirmability*).

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat di pertanggung jawabkan sebagai penulisan ilmiah perlu dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan yaitu:

#### 1. Uji kredibilitas (*Credibility*)

Uji kredibilitas adalah uji kepercayaan terhadap hasil dari data penelitian yang disediakan penulis sehingga hasil dari penelitian tidak diragukan lagi sebagai sebuah karya ilmiah. Oleh karna itu perlu dilakukan beberapa langka yaitu:

##### a. Perpanjangan pengamatan

Perpanjangan pengamatan merupakan tindakan peneliti memperpanjang waktu penelitian yang dilakukan agar hubungan sumber yang lebih dekat dan lebih terbuka, timbul kepercayaan sehingga data yang didapat semakin jelas dan juga lengkap. Perpanjangan pengamatan artinya bahwa peneliti akan kelapangan kembali untuk melakukan pegamatan, wawancara kembali dengan sumber informasi yang ditemui maupun sumber informasi baru.

Perpanjangan pengamatan dilakukan agar dapat menguji kredibilitas informasi penelitian yang difokuskan pada penelitian atas infomasih yang di dapat. Setelah mengecek kembali informasi kelapangan yang di dapat benar atau tidak, ada perubahan atau tidak maka peneliti dapat mempertanggungjawabkan kebenarannya sehingga perpanjangan pengamatan dapat diakhiri.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Dengan meningkatkan kecermatan secara berkelanjutan kepastian informasi dan pengelompokan peristiwa yang berurutan dapat dicatat dan direkam. Meningkatkan kecermatan adalah suatu pendekatan untuk memeriksa/mengendalikan pekerjaan apakah informasi yang telah dikumpulkan, dibuat, dan sediakan itu valid atau tidak. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan ini, penting untuk membangun membaca berbagai referensi, buku, penelitian terdahulu, dan laporan yang berhubungan dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Ini akan membantu mendapatkan hasil penelitian yang berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi adalah usaha pengecekan data yang diperoleh dari berbagai aspek yang berbeda. Adapun bentuk triangulasi yang dimaksud menurut Sugiyono (2007) adalah triangulasi sumber, teknik pengumpulan data, dan waktu.

1) Triangulasi sumber

Triangulasi sumber dilaksanakan agar dapat menguji kredibilitas melalui pengecekan data yang telah didapat dari beberapa sumber. Setelah itu, informasi akan dianalisis peneliti untuk dapat menyimpulkan hasil akhir dan akan meminta kesepakatan oleh tiga sumber (Sugiyono, 2007:274).

2) Triangulasi teknik

Untuk menguji keabsahan informasi, dilakukan pengecekan informasi ke sumber yang sama dengan menggunakan strategi yang cermat. Misalnya dengan melakukan observasi dan wawancara. Jika teknik pengujian keabsahan

data yang bedah maka akan dilakukan diskusi terhadap sumber informasi yang bersangkutan untuk memastikan mana informasi yang dianggap benar (Sugiyono, 2007:274).

### 3) Triangulasi waktu

Triangulasi waktu berfokus pada kapan prosedur wawancara akan diselesaikan kepada sumber yang nantinya dapat membantu peneliti agar memperoleh data yang substansial dan dapat dipertahankan. Setelah itu akan dilakukan dengan wawancara dan juga observasi, atau dengan cara lain dalam berbagai waktu atau keadaan yang sudah ditetapkan.

#### d. Analisis khusus negatif

Analisis khusus negatif artinya peneliti akan mencari data yang berbeda atau mungkin bertubrukan dengan data yang telah didapat sebelumnya. Apabila sudah tidak ada lagi data yang kontradiktif artinya peneliti dapat mengganti temuannya (sugiyono, 2007:275).

#### e. Menggunakan bahan referensi

Bahan referensi yaitu adanya pendukung yang akan memberikan bukti data yang telah ditemukan oleh peneliti. Bukti kebenaran bahwa peneliti telah melakukan penelitian yaitu melalui rekaman wawancara, foto dan dokumen lainnya sehingga dapat di percaya (Sugiyono, 2007:275).

#### f. Mengadakan member check

Tujuan dari member check yaitu dapat menemukan sejauh mana data yang didapat sesuai dengan yang diperoleh melalui sumber informan. Ini

dilakukan agar informasi yang diperoleh akan digunakan untuk mencatat laporan yang diperoleh dari informan (Sugiyono, 2007:276).

## 2. Uji tranferabilitas (*transferability*)

Transferabilitt atau tranferabilitas adalah langka validitas eksternal penelitian kualitatif (Sugiyono, 2007:276). Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau kesesuaian hasil penelitian terhadap populasi dimana sampel di ambil. Laporan penelitian dibuat sedetail mungkin, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya, sehingga pembaca mendapatkan gambaran yang jelas. Dengan demikian hasil penelitian tersebut dapat dijadikan pedoman baik dalam konteks yang sama maupun memiliki perbedaan.

## 3. Uji dependabilitas (*dependability*)

*Dependability* merupakan suatu penelitian apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dependabilitas dilakukan karena terdapat seorang peneliti yang mempuyai data tapi tidak melakukan penelitian langsung di lapangan, sehingga penelitian ini tidak dapat dipercaya. Penelitian ini dilakukan dengan cara melakukan pengujian terhadap proses penelitian dengan pembimbing untuk dapat menerangkan seluruh aktivitas yang dilakukan oleh peneliti. dalam melakukam penelitian.

## 4. Uji obyektivitas (*confirmability*)

Penelitian dapat dikatakan objektif jika hasil dari penelitian sudah disetujui banyka pihak. Penelitian kualitatif uji confirmability dilakukan untuk menguji hasil penelitian yang berkaitan terhadap proses penelitian yang sudah dilakukan.





Kabupaten Luwu memiliki 22 Kecamatan dan 227 Desa/ Kelurahan yang terdiri dari 9 kecamatan berbatasan langsung dengan Teluk Bone di sebelah timurnya. Kecamatan yang berbatasan tersebut diantaranya Larompong, Larompong Selatan, Suli, Belopa, Kamanre, Belopa Utara, Ponrang, Ponrang Selatan, dan Bua. Dari 9 kecamatan yang berbatasan dengan Teluk Bone tersebut terdapat sebanyak 37 desa/kelurahan yang diklasifikasikan sebagai daerah pantai, selebihnya sebanyak 190 desa/kelurahan adalah desa/kelurahan bukan pantai.

Desa Paccerakang merupakan salah satu desa dari Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu. Desa Paccerakang tidak jauh dari jalan poros Palopo-Makassar sekitar 2 km setelah Desa Taramatekkeng.

Desa Paccerakang diyakini sebagai pusat *maccera* (melarang) bagi para bangsawan dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan adat dan syukuran pada waktu itu. Sehingga desa ini diberi nama Paccerakang.

Desa Paccerakang sendiri awalnya adalah Desa Jenne Maeja yang dihuni oleh orang-orang Kamanre pada tahun 1950. Pada tahun-tahun berikutnya, berdatangan orang-orang dari pegunungan untuk menghuni di Desa Paccerakang. Pada tahun 1972 orang Bastem mulai migrasi dan selanjutnya diikuti orang Toraja, kemudian disusul oleh orang Bugis, yang diperkirakan masuk di Desa Paccerakang pada tahun 1980. Sementara itu, dari sisi keagamaan, masyarakat Desa Paccerakang pernah menganut agama *aluktodolo*.

**Gambar 3. Peta Desa Paccerakang**



Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan, memiliki luas 15 km<sup>2</sup>. Secara geografis Desa Paccerakang berbatasan dengan wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara, berbatasan dengan Desa Buntu Karya
2. Sebelah Timur, berbatasan dengan Desa Tarramatekkeng
3. Sebelah Selatan, berbatasan dengan Desa Kamanre
4. Sebelah Barat, berbatasan dengan Desa Padang Kamburi

Secara Topografis, Desa Paccerakang secara umum termasuk daerah dataran sedang dan Daerah aliran sungai (DAS). Berdasarkan ketinggian wilayah Desa Paccerakang diklasifikasikan kepada dataran sedang (>100 – 500 m dpl). Secara umum Tipologi Desa Paccerakang terdiri dari Perladangan, perkebunan dan peternakan.

Secara Administratif, wilayah Desa Paccerakang terdiri dari 6 (enam) Dusun yaitu Dusun Tetewaka, Dusun Tamatika, Dusun Padang Nitu, Dusun Padang



Bajo, Dusun Paccerakan dan dusun Harapan Baru serta 6 (enam) Rukun Tetangga dan dipimpin di bawah kepemimpinan Kepala Desa Galaluddin Banneringgi, ST.

**Gambar 4. Struktur Pemerintahan Desa Paccerakang**



Penduduk di Desa Paccerakang, Kecamatan Ponrang Selatan memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.350 jiwa yang terbagi menjadi 1.229 laki-laki dan 1.121 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 600. Berikut adalah rincian jumlah penduduk dan kepala Keluarga Desa Paccerakang.

**Tabel 2. Jumlah penduduk Desa Paccerakang**

NO	DUSUN	JUMLAH KK	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
1	Tetewaka	107	207	209	416
2	Tamatiku	88	169	158	327
3	Padang Nitu	142	338	287	625

4	Padang Bajo	94	223	185	408
5	Paccerakang	70	107	120	227
6	Harapan Baru	99	185	162	347

Adapun untuk mengembangkan dan meningkatkan Desa Paccerakang agar dapat maju yaitu dengan menentukan Visi Misi Desa Paccerakang yaitu:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Paccerakang yang sejahtera dan demokratis

b. Misi

- 1) Mewujudkan ketersediaan prasarana dan sarana politik yang memadai
- 2) Mendorong kemajuan sektor usaha mikro, kecil dan menengah
- 3) Mengembangkan kualitas sumber daya manusia dan pemahaman masyarakat atas hak dan kewajibannya sebagai warga negara
- 4) Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan
- 5) Menggiatkan kegiatan pembinaan keagamaan, budaya dan olahraga
- 6) Mendorong terlaksananya pemerintahan desa yang efektif dan efisien

**B. Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu**

Leo Agustino dalam bukunya Dasar-Dasar Kebijakan Publik (2008:139), implementasi adalah suatu proses dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran dari kebijakan tersebut. Adapun teori proses implementasi kebijakan menurut Van Meter dan Horn dalam Agostiono (2010) yaitu: standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, hubungan

antar organisasi, karakteristik agen pelaksana, kondisi sosial, ekonomi dan politik dan disposisi implementor.

### **1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Van Meter dan Van Horn menjelaskan standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan tidak tepat dan sesuai, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para pelaksana implementasi.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah bantuan untuk memberdayakan masyarakat berpenghasilan rendah agar mampu membangun rumah atau meningkatkan kualitas rumah secara swadaya sehingga dapat menghuni rumah yang layak dalam lingkungan yang sehat dan aman. Sementara itu kondisi atau sasaran yang ingin dicapai dari pembangunan tersebut antara lain adalah keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan minimum luas bangunan. Seperti yang diutarakan oleh Bapak Ady Sumpratman selaku Tenaga Fasilitator Lapangan BSPS:

“Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya lebih mengutamakan keselamatan bangunan, kesehatan penghuni, dan kecukupan luas bangunan terutama atap, lantai, dan dinding”(wawancara 12 Juli 2022).

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah bantuan pemerintah berupa stimulan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam meningkatkan keswadayaan dalam membangun/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum. Rumah Swadaya yaitu rumah yang dibangun atas prakarsa dan upaya masyarakat. Selanjutnya yang dimaksud dengan Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya sebagai bagian dari permukiman baik

perkotaan maupun pedesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum.

“Program bantuan ini diutamakan bagi masyarakat yang telah memiliki swadaya, artinya di sini bahwa masyarakat dirangsang agar bantuan yang di berikan dapat mencukupi swadaya masyarakat agar dapat memiliki rumah yang layak huni”(Bapak Galaluddin Banneringgi, ST., Kepala Desa Paccerakang, wawancara 11 Juli 2022).

Selain itu berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan sala satu Tenaga Fasilitator Lapangan mengatakan bahwa:

“Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya sebenarnya bukan bantuan yang pokok, yang pokok sendiri yaitu uangnya penerima sendiri (Swadaya penerima bantuan). Bantuan ini hanya untuk menggenapkan/mencukupkan uang penerima bantuan. Jadi bantuan ini lebih mengutamakan masyarakat yang memiliki swadaya. jika ada masyarakat yang tidak memiliki rumah tidak layak huni tapi tidak memiliki swadaya itu bukan dalam kategori, karna syarat penerima BSPS harus siap berswadaya. Karena disepakatannya setelah pembentukan kelompok harus ada tanggung renteng, dan kemudian siap berorganisasi dan siap berswadaya” (Ibu Sri Sulasmi, wawancara 12 Juli 2022).

Adapun dalam pelaksanaan Program mengikuti pedoman Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO.07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, dan masyarakat dalam melaksanakan penyaluran BSPS.

Pelaksanaan program BSPS dilaksanakan melalui proses pengusulan lokasi kemudian akan ditampung dan diverifikasi kembali di kementerian PUPR untuk menentukan calon penerima bantuan sesuai dengan syarat penerima yang sudah ditetapkan oleh Dinas PUPR.

“Pelaksanaan BSPS memang awalnya itu rekomendasi oleh Pak Desa berapa yang diusulkan pak desa, terus ditampung di Dinas PUPR yang nantinya akan diverivikasi kembali siapa calon penerima yang akan

mendapat bantuan. Dan untuk syarat penerima bantuan sendiri kami juga berpatokan dari aturan Menteri PUPR”. (Bapak Adi Supratma selaku pendamping BSPS, wawancara 12 Juli 2022).

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Nur Reski Tim verifikasi data di Dinas

PERKIM:

“Itu memang pertama pengusulan dari desa ke Dinas kemudian kami yang mengusulkan ke Pusat. Tapi kan penentuan alokasinya nanti pusat yang tentukan, semua dari penentuan Kementerian PUPR. Itu melalui aplikasi dari Kementerian PUPR yang namanya e-RTLH, disitu semua kita mengusul”(wawancara 13 Juli 2022).

Setelah Penentuan calon penerima oleh menteri PUPR, nama-nama yang telah ditentukan oleh Dinas PUPR akan diverifikasi ulang oleh Tim Fasilitator Lapangan untuk penyiapan calon penerima bantuan agar benar-benar tepat sasaran. Mereka juga melihat mana rumah-rumah yang memang harus didahulukan karena keterbatasan anggaran tidak seluruhnya rumah tidak layak huni di Desa Paccerakang dapat diberikan bantuan.

“Setelah ada surat keputusan (SK) dari PUPR nama-nama yang hasil inputan dari Pak Desa ditetapkan, kami selaku TFL yang direkrut oleh Kementerian harus menverifikasi kembali data itu. Jadi dari hasil verifikasi kami, kami kirim ke Balai penyedia perumahan yang ada di provinsi dalam hal ini yang diberikan kewenangan kementerian untuk memohon untuk dibuatkan SK bahwa inilah yang layak diberikan dari hasil verifikasi kami”(wawancara, 12 Juli 2022).

Setelah dilakukan pembangunan BSPS di Desa Paccerakang, ditemukan kendala yaitu kurangnya partisipasi dari masyarakat itu sendiri, padahal sebelum dilakukan pembangunan fasilitator dan Kepala Desa telah memberikan sosialisasi terkait konsep BSPS.

“Kalau pelaksanaan biasanya terlambat itu faktor alam, cuaca, paling banyak faktor kemalasan penerima” (Bapak Ady, wawancara 12 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa selain faktor alam, faktor kemalasan penerima menjadi yang faktor utama keterlambatan pembangunan. Target pembangunan BSPS diberi waktu selama kurang lebih 4 bulan. Seperti halnya dilapangan pada saat peneliti melakukan penelitian ada beberapa penerima BSPS hanya sendiri melakukan pembangunan, tentunya ini yang akan menghambat selesainya pembangunan sesuai dengan target yang diberikan.

“Kalau untuk saat ini masa kontraknya 4 bulan mulai dari april sampai juli, untuk ketercapaian program kita harus koordinasi terus dengan kepala desa. Karena yang menentukan itu tukang yang bekerja bukan kami. Kami hanya mendampingi saja. Karena pelaksanaannya sendiri kan msyarakat laksanakan, kami hanya mendampingi saja” (Bapak Ady, wawancara 12 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan, dapat diketahui bahwa kurangnya partisipasi penerima bantuan untuk benar-benar serius membangun rumah secara berkelompok. Selain itu kurangnya ketegasan dari implementor dan pemerintah desa untuk mengajak masyarakat sadar dan paham dengan konsep dari BSPS walaupun sudah dilakukan sosialisasi sebelumnya. Ini dilihat dari kurangnya gotong royong dalam pembangunan. Mereka lebih memilih untuk membangun rumahnya sendiri atau hanya menggunakan 1-2 tukang untuk membangun rumah. Yang dimana seharusnya dalam aturan mengutamakan kemandirian masyarakat yang dapat membangun rumahnya secara gotong-royong.

Meskipun terkendala dari kurangnya kerja sama masyarakat dan kurangnya ketegasan implementor dalam pembangunan BSPS di Desa Paccerakang bantuan BSPS sangat dirasakan manfaatnya:

“Alhamdulillah sangat membantu kami ini sebagai masyarakat di Desa Paccerakang dengan adanya bantuan BSPS” (Ibu Izzah penerima bantuan BSPS, Wawancara 12 Juli 2022).

Hal senada juga dikatakan oleh salah satu penerima bantuan:

“Sangat membantu, kemarin rumah saya itu kayu sekarang sudah bisa membangun rumah beton” (Bapak Agus penerima bantuan BSPS, wawancara 13 Juli 2022).

Maka berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk proses pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang sudah sesuai dengan aturan yang diberikan oleh Kementerian PUPR. Adapun untuk bantuan BSPS di Desa Paccerakang sudah tepat sasaran dan diberikan kepada masyarakat yang berpenghasilan rendah (MBR). Proses pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang dimulai dari mengusulkan nama-nama calon penerima yang memang masyarakat berpenghasilan rendah, yang akan diverifikasi oleh PUPR kemudian akan diverifikasi ulang oleh TFL untuk mengolah data para calon penerima BSPS kemudian akan dibuatkan SK calon penerima bantuan.

## **2. Sumber Daya**

Van Meter dan Van Horn menjelaskan implementasi kebijakan perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Jika para implementor memiliki responsibilitas dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan maka dapat dipastikan bahwa kebijakan tersebut akan berhasil sesuai apa yang diharapkan oleh isi kebijakan.

### **1. Sumber daya manusia**

#### **a) Fasilitator**



Fasilitator merupakan orang yang mendampingi masyarakat dari tahap sosialisasi sampai pada pembangunan.

“Yang dikasih kepercayaan dalam mendampingi pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang kami ada dua orang saya sendiri dan ibu Sri. Pemilihan TFL itu direkrut berdasarkan pengalaman-pengalaman yang dipilih oleh pusat melalui Balai Pelaksana Perumahan”(Bapak Ady dan Ibu Sri Sulasmi selaku TFL, wawancara tanggal 12-07-2022).

Selanjutnya berdasarkan keterangan Ibu Nur Reski mengenai perekrutan TFL mengatakan bahwa:

“Yang memilih pendamping itu kan ada proses perekrutan dari Balai Pelaksana Perumahan. Yang memilih pendamping itu langsung dibuka perekrutannya dari Balai Pelaksana Perumahan Sulawesi tiga, itu yang membuka perekrutan untuk merekrut fasilitator. Mereka yang menetapkan, mengesahkan. Ini kan anggarannya dari APBN bukan APBD kan” (Wawancara tanggal 13-07-2022)

Adapun tugas Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) mempunyai tugas sebagai berikut:

- Melakukan sosialisasi, penyuluhan, dan pembekalan masyarakat
- Melakukan seleksi calon penerima BSPS
- Mendampingi calon penerima BSPS dalam penyusunan dan pengajuan proposal
- Mendampingi penerima BSPS dalam pemanfaatan bantuan
- Mendampingi penerima BSPS dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban
- Menyusun laporan kegiatan

Pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang berdasarkan penelitian, TFL telah mendampingi penerima bantuan, tidak ada kendala bahan bangunan maupun dana dalam pelaksanaan BSPS.



“Batunya saja tidak cukup 1 biji koordinasi dengan kami, karena itu tugas kami bagaimana barangnya bisa sampai kepenerimanya, makanya saat pengantaran barang memang harus dihitung karena jika ada yang kurang kami bisa koordinasikan ke toko bangunan” (Bapak Ady, wawancara 12 Juli 2022).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh salah satu penerima bantuan Bapak Daud:

“Kalau ada bahan bangunan yang kurang kami konfirmasi ke pendamping untuk mengonfirmasi ke toko bangunan” (wawancara 12 Juli 2022).

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti dapat menyimpulkan bahwa TFL telah mendampingi penerima bantuan dalam pembangunan rumah.

#### b) Masyarakat Penerima Bantuan

Penerima bantuan adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang memiliki rumah tidak layak huni. Di Desa Paccerakang Program BSPS sudah 3 kali mendapat bantuan oleh kementerian PUPR. Adapun jumlah unit rumah yang mendapat bantuan tahun 2019, 2021 dan 2022 berbedah-bedah.

“Penerima bantuan BSPS pada tahun 2022 berjumlah 19 unit, tahun 2021 berjumlah 20 unit dan pada 2019 jumlah penerima bantuan 15 unit. Jadi penerima bantuan BSPS itu berbedah-bedah setiap tahunnya, tergantung dari kuota yang diberikan oleh kementerian” (Bapak Galaluddin, wawancara 11 Juli 2022).

Berikut nama-nama masyarakat yang mendapatkan bantuan Program BSPS di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan tahun 2022.

**Tabel 3. Nama-nama Penerima BSPS Bantuan Tahun 2022**

NO	Nama Penerima Bantuan	Alamat Penerima Bantuan
1	Heriyadi	Dusun Padang Bajo
2	Elvis Jamani	Dusun Padang Bajo
3	Benyamin Simpan	Dusun Padang Nitu

4	Busman	Dusun Tamatiku
5	Ibrahim	Dusun Padang Nitu
6	Agus Diansyah	Dusun Padang Nitu
7	Markus Pangala	Dusun Tetewaka
8	Amirulla	Dusun Paccerakang
9	Daud	Dusun Paccerakang
10	Parman	Dusun Tamatiku
11	Lilis Manding	Dusun Tamatiku
12	Simon	Dusun Padang Bajo
13	Agus Sempo	Dusun Tetewaka
14	Yawan	Dusun Tetewaka
15	Sanda	Dusun Paccerakang
16	Risman	Dusun Paccerakang
17	Izzah Fitthohiro	Dusun Tamatiku
18	Natan Barri	Dusun Paccerakang
19	Ponggi Pasima	Dusun Harapan Baru

Nama-nama penerima bantuan BSPS di atas adalah mereka yang telah di verifikasih dan telah memenuhi persyaratan yang ada. Nama-nama ini kemudian dijadikan satu kelompok yang disebut dengan kelompok penerima bantuan.

c) Kepala Desa/Lura

Kepala Desa dan Fasilitator bersama-sama mendata rumah mana saja yang akan menerima bantuan BSPS. Kepala desa berperan penting dalam pelaksanaan BSPS di Desa paccerakang mulai dari pengusulan nama-nama calon penerima

hingga berperan dalam mengawasi pelaksanaan BSPS untuk mengetahui sejauh mana pembangunan.

d) Bidang Penanganan BSPS Dinas PERKIM

Dinas PERKIM berfungsi sebagai Tim verifikasi data dalam pelaksanaan BPS. Seperti yang diutarakan oleh Ibu Sri Sulasmi selaku Tim verifikasi data di Dinas PERKIM:

“Kami disini pada tahun-tahun kemarin itu sebagai Tim teknis tapi sekarang itu sebagai Tim verifikasi data. Sekarang itu sudah dibatasi sekarang hanya tim verifikasi data. Jadi disini nama yang diusulkan oleh Kepala Desa, kami yang akan usulkan ke PUPR.” Jadi kami disini hanya menerima laporan dari Tim Fasilitator. Jadi yang melakukan pengawasan itu adalah TFL” (wawancara 13 Juli 2022).

2. Sumber daya finansial

Selain sumber daya manusia, juga dibutuhkan sumber daya yang lain, seperti besarnya dukungan alokasi dana atau perangsang (incentive) untuk biaya peningkatan kualitas rumah. Alokasi dana yang digunakan dalam bantuan Program BPS di sini yaitu menggunakan dana dari APBN. Anggaran itu langsung dari kementerian PUPR melalui balai pelaksana perumahan.

Adapun dana dalam pembangunan rumah tergantung dari dana yang diberikan oleh kementerian PUPR. Program BPS yang ada di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang selatan mulai ada sejak tahun 2019. Namun pada tahun 2020 Desa Paccerakang tidak mendapat bantuan BPS dari pemerintah, pada tahun 2021-2022 Desa Paccerakang kembali mendapatkan Bantuan BPS.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan bapak Galaluddin Banneringgi selaku kepala Desa di Desa Paccerakang mengatakan bahwa:

“Dana yang diberikan oleh kementerian PUPR Pada tahun 2019 berjumlah 17.5 juta, 15,5 juta untuk material dan 2 juta untuk upah tukang. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 dana yang diberikan sama. Tahun 2021-2022 dana yang diberikan 20 juta, 17.5 juta untuk material dan 2.5 juta untuk upah” (wawancara 11 Juli 2022).

Adapun dalam pencairan dana BPS terbagi atas 2 tahap. Pada tahap pertama pengiriman bahan bangunan ke lokasi penerima bantuan dan tahap kedua pemberian upah gaji. Pada tahap kedua upah gaji dapat diberikan apabila kondisi bangunan sudah mencapai 30%.

“Upah gaji itu diambil secara tunai tapi prosesnya harus mencapai 30% bangunan rumah baru bisa di tarik oleh pihak bank. Pihak bank sendiri yang langsung bagikan, bukan siapa-siapa. Dulu itu tahun 2016 pernah terjadi dana sudah dikasih tapi rumahnya tidak selesai, dia hanya gunakan konsumsi bukan pembangunan rumah, sehingga berubah lagi sistemnya” (Bapak Ady sebagai TFL, wawancara 12 Juli 2022).

Dari hasil penelitian. Peneliti dapat menyimpulkan bahwa untuk sumber daya manusia dalam pelaksanaan BPS di Desa Paccerakang sudah ikut terlibat dalam pelaksanaan program ini. Dan untuk sumber daya finansial (anggaran dana) sendiri, tidak ditemukan permasalahan kekurangan dana ataupun bahan bangunan. Semua sudah sesuai dengan anggaran yang disediakan oleh pemerintah.

### **3. Hubungan Antar Organisasi**

Faktor komunikasi antar Tim Fasilitator lapangan Program BPS sebagai alat yang digunakan agar berjalannya dengan baik program BPS. Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Akan tetapi sering terjadi dalam penyaluran komunikasi, adanya salah pengertian atau miskomunikasi. Hal tersebut terjadi karena alur komunikasi telah melalui beberapa tingkat birokrasi, sehingga apa yang diharapkan kadang terjadi miskomunikasi.

Hubungan antara fasilitator dan Dinas PERKIM dalam pelaksanaan BSPS dimulai melalui pada penyeleksian calon penerima bantuan. Kepala Desa memberikan usulan nama-nama calon penerima yang tidak layak huni di Desa Paccerakang ke Dinas PERKIM, kemudian Dinas PERKIM akan menverifikasi data nama calon penerima yang akan diusulkan ke kementerian PUPR. Di Dinas PUPR akan menyeleksi kembali calon nama penerima bantuan. Setelah PUPR menentukan calon penerima, selanjutnya berkoordinasi dengan TFL untuk menverifikasikan kembali nama-nama yang telah ditentukan oleh PUPR, kemudian akan di kirim ke Balai penyedia perumahan yang ada di provinsi untuk dibuatkan SK. Setelah SK keluar TFL dan Kepala Desa mengumpulkan calon penerima bantuan untuk melakukan sosialisasi kepada penerima bantuan. Seperti yang dikatakan oleh Ibu Resky:

“Itu pengusulannya pertama memang dari desa mengusulkan ke Dinas, kami mengusulkan ke pusat. Kan penentuan alokasinya nanti pusat yang tentukan, semua dari kementerian PUPR” (Ibu Nur Reski selaku staf Dinas PERKIM, wawancara 13 Juli 2022).

Ini juga dibenarkan oleh Ibu Izzah:

“Untuk hubungan implementor dan penerima bantuan bagus ji, itu hari kami dikumpulkan oleh Kepala Desa dan tim pendamping untuk sosialisasi bantuan ini” (wawancara 13 Juli 2022).

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, maka peneliti menyimpulkan bahwa untuk hubungan antara implementor dan penerima bantuan terjalin dengan baik, dimulai pada saat penentuan calon penerima sampai dengan pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang.

#### **4. Karakteristik Agen Pelaksana**

Dalam implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya dalam penyediaan rumah layak huni di Desa Paccerakang, pedoman kerja bagi para implementor dalam pelaksanaan BSPS adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No.07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

Adapun instansi yang terlibat dan berperan dalam proses pemberian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya yaitu Kementerian PUPR, Bank penyalur, pemerintah daerah (kabupaten/kota dan desa) yang mengusulkan penerima bantuan stimulan, tenaga fasilitator lapangan (TFL), Dinas PERKIM dan juga pihak yang ditunjuk untuk bahan bangunan.

“Kalau pengusulan calon penerima bantuan itu dari kepala desa, kepala desa koordinasi dengan Dinas PERKIM untuk mengusulkan nama calon penerima ke pusat. Setelah penetapan calon penerima oleh pusat, kami tim fasilitator akan membawa nama-nama calon penerima ini untuk mendampingi mereka dalam pembangunan rumah hingga selesai” (Ibu Sri, wawancara 12 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara disimpulkan bahwa untuk komunikasi antara agen pelaksana dan penerima bantuan sudah terjalin baik dan terbuka. Ini dilihat pada saat penyaluran bantuan TFL dan pemerintah desa telah mendampingi selama proses pembangunan hingga selesainya pembangunan.

#### **5. Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik**

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan untuk implementasi kebijakan, karakteristik partisipan apakah mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini

publik yang ada dilingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Lingkungan ini akan mempengaruhi implementasi kebijakan untuk mengetahui kesuksesan implementasi kebijakan itu sendiri.

Kondisi sosial, politik dan ekonomi menjadi sebuah pertimbangan yang sangat penting dalam mendukung pencapaian sasaran kebijakan publik yang tepat dan terarah atau bisa sebaliknya, karena lemahnya kondisi ekonomi, sosial dan politik dapat menyebabkan sifat ketergantungan masyarakat terhadap program-program yang dibuat oleh pemerintah menjadi lebih besar dan semakin membuat masyarakat tidak dapat membiasakan diri untuk mengembangkan potensi diri.

#### 1) Kondisi Sosial

Kondisi sosial dalam pelaksanaan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya juga berpengaruh dalam keberhasilan dari kebijakan itu sendiri. Berdasarkan penelitian dilapangan masih ada beberapa penerima bantuan kurang memiliki kerja sama yang baik pada saat pembangunan rumah. Ini di lihat hanya sebagian kecil masyarakat penerima bantuan yang benar-benar serius dalam mengerjakan rumah mereka. Padahal berdasarkan syarat yang telah ditentukan oleh menteri PUPR mereka harus siap membentuk kelompok untuk siap membangun. Seperti yang diutarakan oleh beberapa informan berikut:

“Cuman saya ji kerja tadi, tidak masuk tukang” (Bapak Agus penerima bantuan BSPS, wawancara 13 Juli 2022).

“Tidak ada tukang ku tidak datang, ada yang pergi ke kebun” (Bapak yawan penerima bantuan BSPS, wawancara 13 Juli 2022).

“Tidak kerja tadi karena pergi membersihkan ke kebunnya” (Bapak Daud penerima bantuan BSPS, wawancara 13 Juli 2022).

Selain itu faktor penghambat tidak terselesainya pembangunan karena faktor keadaan alam. Seperti yang diutarakan oleh Bapak ady:

“Biasanya terlambat itu faktor keadaan alam, cuaca, paling banyak faktor kemalasan” (Bwawancara 13 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa masih ada masyarakat kurang berpartisipasi dalam pembangunan rumah. Mereka yang telah mendapat bantuan tidak benar-benar serius untuk melakukan pembangunan, ini karena faktor kemalasan masyarakat. Selain itu adapun faktor pengambat pembangunan juga dipengaruhi faktor keadaan alam.

## 2) Kondisi Ekonomi

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti di Desa Paccerakang Kecamatan Pondrang Selatan, Kondisi ekonomi penerima Program BSPS yaitu masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang sebagian besar pekerjaan mereka adalah berprofei sebagai petani.

“Program ini sangat membantu, dengan adanya bantuan kami bisa memiliki rumah yang layak dari sebelumnya, bantuan yang diberikan sangat membantu untuk membangun rumah ini” (Bapak Amirullah, Wawancara 12 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa dengan adanya program BSPS dirasakan manfaatnya oleh penerima bantuan, dengan adanya tambahan bantuan yang diberikan merangsang penerima bantuan untuk membangun rumah layak huni.

## 3) Kondisi Politik

Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan Program BSPS di Desa Paccerakang, pemerintah telah mengutamakan masyarakat berpenghasilan rendah



(MBR) yang telah memiliki swadaya dalam memilih calon penerima bantuan BSPS.

“Yang tahu persis soal kondisi masyarakat yang ada di Desa Kepala Desa, saya memiliki data-data setiap penduduk yang ada di sini. Kita punya data Backlog atau semacam database. Jadi tinggal itu yang kami cek yang mana benar mendesak dengan kriteria yang ditetapkan. (Bapak Galaluddin, wawancara 13 Juli 2022).

Lanjutnya:

“Mungkin juga ada yang memenuhi persyaratan tapi bantuan ini tidak cukup sesuai kuota diberikan, nah mereka ini beranggapan langsung ini pilih kasih padahal yang tahu keadaan masyarakat kita pemerintah desa. Awalnya itu opini masyarakat tahun 2019 yang dikasi itu pendukungnya Pak Desa, itu berkembang tapi kan terbantahkan, karena hampir dari penerima itu bukan pemilih saya. Masuk 2021-2022 yang dikasi itu keluarga Pak Desa, ini terbantahkan juga. Ini dilihat karena masyarakat juga tidak dapat membuktikan bahwa opininya benar”

Selanjutnya peneliti juga mewawancarai penerima bantuan BSPS:

“Menurut saya penetapan calon penerima bantuan BSPS ini sudah tepat, saya lihat calon penerima tahun ini memang layak untuk mendapat bantuan. Ini karena mereka semua ini adalah sebagian besar petani yang sama dengan saya”( Bapak Natan Barri, wawancara 12 Juli 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dilapangan, dapat disimpulkan bahwa tidak ada pemilihan sepihak dalam penentuan calon penerima bantuan. Penerima bantuan BSPS yang ada di Desa Paccerakang telah memenuhi syarat yang ditentukan. Adapun jika ada masyarakat yang layak diberikan tapi kuota yang diberikan pemerintah pusat hanya terbatas maka pemerintah desa lebih mengutamakan yang mendesak.

## **6. Disposisi Implementor**

Menurut pendapat Van Metter dan Van Horn dalam Agustinus (2006) sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi

keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi warga setempat yang mengenal betul permasalahan dan persoalan yang mereka rasakan. Tetapi kebijakan publik biasanya bersifat *top down* yang sangat mungkin para pengambil keputusan tidak mengetahui bahkan tak mampu menyentuh kebutuhan, keinginan atau permasalahan yang harus diselesaikan.

Sikap Implementor dipengaruhi oleh pandangannya terhadap suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan itu terhadap kepentingan-kepentingan organisasinya dan kepentingan-kepentingan pribadinya. Dalam implementasi kebijakan Para aparat pemerintah, mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Tenaga Pengelola, Fasilitator dan juga masyarakat sendiri sebagai kelompok sasaran adalah mereka yang secara langsung berperan bagi berhasil tidaknya kebijakan.

Dalam pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang sikap para implementor dapat mempengaruhi keberhasilan kebijakan. Ini karena jika para implementor BSPS dijalankan dengan baik, maka akan ditanggapi baik juga oleh penerima bantuan. Adapun BSPS yang saat ini berjalan di Desa Paccerakang yaitu BSPS yaitu bantuan yang menggunakan dana dari APBN. Jadi penentuan kuota penerima bantuan berdasarkan dari pemerintah pusat dan tentunya terbatas. Untuk sikap para implementor dalam pelaksanaan BSPS tidak ditemukan permasalahan, tidak ada keluhan dari penerima calon bantuan maupun implementor sendiri. Hubungan antara Implementor dan penerima bantuan berjalan dengan baik dan

tentunya bantuan BSPS di Desa Paccerakang sangat membantu masyarakat untuk dapat memiliki rumah yang layak huni dari sebelumnya.

### **C. Ketercapaian Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu**

Menurut George C. Edward III (1980:1), keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

#### **1. Komunikasi**

Komunikasi adalah sesuatu yang sangat penting, dimana pemberian informasi kepada publik bisa memberikan bertambahnya kepercayaan publik dan mendapat kesan yang baik dari publik terhadap kegiatan-kegiatan organisasi pemerintahan itu sendiri. Komunikasi merupakan keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, dimana yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group), sehingga akan mengurangi distorsi implementasi.

Pada pelaksanaan BPS di Desa Paccerakang ditemukan miskomunikasi pelaksanaan kebijakan BPS. Pada tahun 2019 pelaksanaan BPS tidak berjalan lancar. Ini disebabkan karena pada saat Pemerintah Desa mensosialisasikan tentang BPS kepada seluruh masyarakat yang ada di Desa Paccerakang masyarakat beranggapan bahwa mereka yang dikumpulkan untuk mengikuti sosialisasi BPS adalah mereka yang akan menerima bantuan BPS. Padahal dalam kenyataannya masyarakat dikumpulkan untuk mengetahui yang layak

mendapat bantuan adalah sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh Meneteri PUPR. Pada tahun 2019 kemarin proses implementasi BSPS dimulai dari mensosialisasikan terlebih dahulu bantuan BSPS kemudian akan menverifikasi nama-nama calon penerima bantuan.

“Tahun 2015-2020 kemarin itu pelaksanaan BSPS kami mulai dengan sosialisasi kemudian melakukan verifikasi, ternyata disaat verifikasi kami selesaikan banyak orang merasa kecewa karna dia hadir sosialis, ketika dia hadir sosialisasi dia beranggapan bahwa kita ini sudah dapat bantuan padahal ternyata tidak. Jadi kita rubah mindsetnya” (Bapak Ady, wawancara 12 Juli 2022).

Pernyataan tersebut dibenarkan oleh penerima bantuan BSPS 2019 Ibu leni:

“Tahun 2019 kemarin penerima BSPS memang dikumpulkan pemerintah untuk sosialisasi dulu” (Wawancara 12 Juli 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas membuktikan bahwa implementasi BSPS di Desa Paccerakang belum maksimal. Sehingga pemerintah mengubah mindset pelaksanaan BSPS lagi. Dimana bantuan BSPS dimulai dari menverifikasi nama-nama calon penerima bantuan, setelah diverifikasi kemudian akan mensosialisasikan Program BSPS kepada masyarakat yang akan menerima bantuan.

“Tahun 2021-2022 saat ini proses pelaksanaan BSPS sudah berubah. Sekarang yang kami sosialisasikan itu yang berdasarkan nama-nama yang ada di situ. Jadi jangan sampai kami panggil lagi untuk sosialisasi tapi tidak sesuai dengan hasil verifikasi” (Bapak Ady, Wawancara 12 Juli 2022).

Namun berdasarkan wawancara di atas nyatanya masih ditemukan permasalahan dilapangan. Masih ada masyarakat yang mengeluhkan tentang bantuan ini tidak tepat sasaran. Masyarakat beranggapan jika bantuan ini adalah bantuan untuk orang miskin.

“Saya kira bantuan BPS itu bantuan pemerintah kepada masyarakat miskin” (wawancara Ibu Lince selaku masyarakat”(wawancara 13 Juli 2022).

“Saya tidak pernah mendapat bantuan apapun dalam pembangunan rumah, padahal saya ini tidak memiliki pekerjaan” (Bapak Dapin selaku masyarakat. Wawancara 13 Juli 2022).

Berdasarkan wawancara di atas ternyata masih ditemukan masyarakat yang belum paham betul terkait bantuan BPS ini. Masih ada masyarakat beranggapan jika bantuan ini adalah bantuan untuk orang miskin. Oleh karena itu pemerintah perlu untuk mensosialisasikan atau memberikan pemahaman lebih kepada masyarakat tentang program bantuan ini agar tidak ada kecemburuan sosial masyarakat kepada penerima bantuan.

## **2. Sumber Daya**

### **1. Sumber Daya Manusia**

Keberhasilan suatu program sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan program. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumberdaya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Tidak kalah pentingnya sumber daya manusia dalam suatu kegiatan maupun program. Untuk mendapat hasil yang baik terhadap suatu kegiatan maupun program sudah tentunya para pekerja memiliki kemampuan dan keterampilan terhadap pekerjaannya.

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaksanaan BPS di Desa Paccerakang belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Ini disebabkan karena ada sebagian tenaga

kerja untuk membangun rumah tidak memiliki perencanaan yang baik. Ini dilihat dari keterlambatan dalam membangun rumah sesuai dengan waktu yang ditentukan. Pada saat pembangunan rumah kurangnya peran sumber daya manusia dalam hal ini adalah penggunaan tenaga kerja dalam pembangunan.

“Pembangunan rumah kami melewati batas dari waktu yang telah ditentukan, ada juga beberapa rumah lainnya yang masih dalam pekerjaan” (Bapak Natan, 10 Agustus 2022).

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara dan penelitian dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu implementasi dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang digunakan. Apabila sumber daya manusia yang digunakan tidak memiliki keahlian dan keterampilan serta kerja sama yang baik dalam pelaksanaan pembangunan maka program yang dilaksanakan tidak akan dapat berjalan baik sesuai dengan yang diharapkan.

## 2. Sumber Daya Finansial

Suatu kegiatan atau program dapat berjalan dengan lancar tergantung dari tersedianya anggaran yang memadai. Anggaran untuk Program BSPS di Desa Paccerakang adalah anggran dari APBN. Anggaran untuk BSPS Di Desa Paccerakang pada tahun 2019 yaitu 17 juta. 15 juta untuk material dan 2 juta untuk upah tukang. Dan untuk tahun 2021-2022 berjumlah 20 juta, 17.5 juta untuk material dan 2.5 juta untuk upah tukang. Adapun untuk anggaran pembangunan pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang tidak ada hambatan. Dana yang diberikan kepada penerima bantuan sesuai dengan anggran yang diberikan oleh pemerintah pusat.

“Kalau dana sendiri tidak ada ji yang komplain, semua bahan yang dikirim ke lokasi sesuai dengan jumlh dana yang dikasih” (Bapak Galaluddin, wawancara 11 Juli 2022).

“Kalau dari dana tidak ada hambatannya, karena itu prosesnya dana memalui hanya dari transfer ke toko. Penerima pun tidak perna mengambull dana itu. Dana masuk rekening penerima, dari rekening penerima ditarik kembali masuk ke toko untuk dibayarkan barangnya. (Bapak Ady, wawancara 12 Juli 2022).

Ini dibenarkan oleh penerima bantuan:

“Untuk dana sendiri tidak ada ji kendala, semuai sesuai ji”(Bapak Amirullah, wawancara 12 Juli 2022).

Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa untuk anggaran dalam pelaksanaan BPS di Desa paccerakang sudah berjalan dengan baik. Tidak ada keterlambatan dalam pencairan dana, baik itu bahan bangunan dan pencarian upah tukang.

### **3. Disposisi**

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Komitmen untuk senantiasa jujur dan demokratis oleh pemerintah daerah sangat diperlukan dalam pelaksanaan program bedah rumah yang dilaksanakan. Disposisi dalam implementasi kebijakan program BPS yaitu apakah program sudah pada sasarannya dan dalam menentukan keluarga sasaran apakah sudah tepat pada keluarga sasaran. Untuk pelaksanaan BPS di Desa Paccerakang terlihat sudah tepat sasaran. Ini dibuktikan berdasarkan:

“Untuk penerima bantuan BPS diberikan kepada masyarakat berpenghasilan rendah dan siap untuk berswadaya. Semua yang mendapatkan bantuan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan. Kita punya data-data penduduk jadi ini bisa membuktikan jika penerima

bantuan memang layak diberikan dan telah tepat sasaran.”(Bapak Galaluddin, Wawancara 12 jukli 2022).

Peneliti juga melakukan wawancara dengan penerima bantuan BSPS:

“Saya lihat masyarakat penerima BSPS sudah tepat sasaran, semua penerima bantuan ini memang layak diberikan”.

Berdasarkan hasil penelitian dan juga wawancara peneliti dengan informan, untuk pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang sudah dilakukan secara jujur. Ini juga dibuktikan para implementor juga telah melakukan tugasnya dalam mendampingi pembangunan BSPS di Desa Paccerakang. Selama peneliti melakukan penelitian, penerima bantuan BSPS tidak mengeluhkan akan persoalan dana yang kurang serta tidak ada komplain dari penerima bantuan kepada para implementor. Penerima bantuan sudah sesuai dengan ukuran atau indikator kemiskinan yang telah ditentukan, lepas dari segala kepentingan, sehingga program ini sudah tepat sasaran.

#### **4. Struktur Birokrasi**

Aspek struktur birokrasi mencakup hal-hal yang sangat penting yaitu mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan Program BSPS adalah mekanisme pelaksanaan, dalam hal ini bagaimana kerangka kerja yang dipakai.

Dalam proses pelaksanaan BSPS, belum sepenuhnya berjalan secara optimal. Ini dilihat dari ada berapa dalam pembangunan rumah ditemukan kurangnya kerjasama kelompok dalam membangun rumah seperti yang dijelaskan dalam mekanisme pengelolaan bantuan BSPS yaitu kelompok penerima bantuan siap bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan secara gotong royong dalam



pelaksanaan pembangunan. Ini dilihat dari kurangnya keahlian tukang serta masih ditemukan penerima bantuan tidak menggunakan tukang dalam pembangunan sehingga ada beberapa rumah yang tidak terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Selain itu ada juga faktor keadaan alam. Misalnya hujan.

Dari hasil analisis di atas membuktikan betapa Pentingnya struktur birokrasi dalam mekanisme pelaksanaan program bedah rumah yang dilaksanakan, tentunya menunjang agar program dapat berjalan dengan lancar dan program ini bisa terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.



## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Proses Pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu ini belum sepenuhnya berhasil secara keseluruhan. Ini ditandai dari pada saat pelaksanaan pembangunan, masih ada beberapa rumah yang tidak terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan. ini karena kemalasan masyarakat. Masyarakat tidak memiliki keseriusan dan kerjasama yang baik dalam pembangunan sehingga pembangunan tidak terselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan. Selain itu ini dilihat juga dari kurang tegasnya implementor dalam mendampingi penerima bantuan, jika para implementor dapat mendampingi secara tegas dan memberi tindakan yang tegas jika menemukan ada pembangunan yang tidak dikerjakan atau tidak memiliki tukang dalam pengerjaan rumah pasti pembangunan rumah akan terselesaikan sesuai dengan jangka waktu yang diberikan.
2. Untuk ketercapaian Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Paccerakang sendiri sudah tepat sasaran. Ini ditandai berdasarkan hasil penelitian dimana penerima bantuan BSPS di Desa Paccerakan adalah Masyarakat Yang Bepernghasilan Rendah yang tidak memiliki rumah layak huni dan telah siap untuk bersawdaya.

Pemerintah mengutamakan masyarakat yang memang mendesak untuk lebih mengutamakan dalam memberikan bantuan ini.

### **B. Saran**

1. Pelaksanaan BSPP di Desa Paccerakang perlu di tingkatkan lagi. Para Implementor perlu lebih tegas dalam mendampingi penerima bantuan agar dalam pembangunan penerima bantuan benar-benar komitmen dalam menyelesaikan rumah agar pembangunan dapat terselesaikan sesuai dengan waktu yang diberikan.
2. Komunikasi antara Pemerintah Desa dengan masyarakat setempat lebih terbuka agar masyarakat dapat memami sarana dari Program BSPP untuk siapa agar tidak ada kecemburuan sosial lagi antara masyarakat dan penerima bantuan BSPP.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulla, Syukur. (1988). *Perkembangan Studi Implementasi*. Jakarta. Lembaga Administrasi Negara RI.
- Alexander, Tjilen. (2019). *Konsep, Teori dan Teknik, Analisis Implementasi, Kebijakan Publik*, Bandung. Hikam Media Utama
- Gaffar, Affan. (2009). *Politik Indonesia. Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Maipita, Indra. (2013). *Memahami dan Mengukur Kemiskinan*. Absolute Media.
- Moleong. (2010). *Metodologo Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya.
- Nugroho, Riant. (2017). *public policy*. Jakarta. PT. Elex Media Komputindo.
- Siagian, Valentine, dkk. (2020). *Ekonomi dan Bisnis Indonesia*. Yayasan Kita Menulis.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta.
- Yusri, Mohammad. (2022). *Integritas Kebijakan Regional dan Kemiskinan*. UMSU Press.
- Winarno, Budi. (2008). *Kebijakan Publik*. Jakarta. Pt. Buku Kita.

### Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Permukiman.
- PERMENPUPR Nomor 07/PRT/M/2018 Tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya.

### Jurnal

- Adhayani, N. (2014). Implementasi Pelaksanaan Program Bedah Rumah Kecamatan Benteng Kabupaten Kepulauan Selayar. *Analysis of Micro-Earthquakes in the San Gabriel Mountains Foothills Region and the Greater*

*Pomona Area As Recorded By a Temporary Seismic Deployment, 1*(hal 140), 43. <http://www.springer.com/series/15440%0Apapers://ae99785b-2213-416d-aa7e-3a12880cc9b9/Paper/p18311>

Arif, Rohman. (2019). *Implementasi Program Bedah Rumah Sebagai Upaya Penanganan Permukiman Kumuh di Kota Malang (Studi di Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Malang*. University of Muhammadiyah Malang.

Hikmwati, Eny dan Tri Gutomo. (2016) *Bedah Rumah Sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan House Rehabilitation as Poverty Elimination Form. Jurnal PKS, 15*(2), 131-144.

Hutomo. (n.d.). *Bedah Rumah sebagai Bentuk Pengentasan Kemiskinan House Rehabilitation as Poverty Elimination Form*.

Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2004). *Implementasi Kebijakan dan Pengertian Implementasi*. 19–42.

Ilham. (2021). *Analisis Pelaksanaan Program Bedah Rumah bagi Masyarakat yang Kurang Mampu di Desa Lalume Kecamatan Pakue Kolaka Utara*. 6.

Kara, H., & Ağargün, O. A. M. (2014). *Kebijakan Publik. Paper Knowledge. Toward a Media History of Documents, 7*(2), 107–115.

Khadji, Yulianto. 2012. *Kemiskinan dan Konsep Teoritisnya*. Guru Besar Kebijakan Publik Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNG, 1-7.

Khotima, K. (2018). *Analisis Program Bantuan Rumah Layak Huni terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Mesuji dalam Perspektif Ekonomi Islam*. 1–19

Likulayang, L. C., Tampi, G. B., & Mammbo, R. (2017). *Efektivitas Program Bedah Rumah (Study Kasus di Desa Ranoketang Atas Kecamatan Touluaan Kabupaten Minahasa Tenggara)*. 59.

Mamangkey, A., Lumolos, J., & Pangemanan, F. (2019). *Pelaksanaan program bantuan stimulan perumahan swadaya (bsps) di kecamatan amurang timur kabupaten minahasa selatan. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintah, 3*(3), 1–7. [https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as\\_sdt=0%2C5&q=PELAKSANAAN+PROGRAM+BANTUAN+STIMULAN++PERUMAHAN+SWADAYA+%28BSPS%29+DI+KECAMATAN+AMURANG++TIMUR+KABUPATEN+MINAHASA+SELATAN&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=PELAKSANAAN+PROGRAM+BANTUAN+STIMULAN++PERUMAHAN+SWADAYA+%28BSPS%29+DI+KECAMATAN+AMURANG++TIMUR+KABUPATEN+MINAHASA+SELATAN&btnG=)

- Sangadji, S., Abadi, T. W., & Fauziah, L. (2015). Karakteristik Kemiskinan dan Penanggulangannya di Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Sosial Dan Pembangunan*, 31(2), 495. <https://doi.org/10.29313/mimbar.v31i2.1563>
- Sari, D. M. (n.d.). *Implementasi Kebijakan Program Bedah Rumah (Studi Kasus Kecamatan Kotabumi Selatan)*.
- Supardi. (2016). Pengawasan Pelaksanaan Program Bedah Rumah Masyarakat Miskin di Desa Semelagi Besar Tahun 2012 Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik MONITORING OF PROGRAM IMPLEMENTATION OF POOR PEOPLE HOME SURGERY IN SEMELAGI BESAR. *Jurnal S-1 Ilmu Administras Negara*, Volume 5 N.
- Sutriyono, A. (2014). *Problematika Program Bedah Rumah bagi Masyarakat Penerima Bantuan*.
- Tarigan, & Bastanta, R. (2018). Teori Masyarakat Berpenghasilan Rendah. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 1(3), 82–91. <https://repositori.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/10518/130903126.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Tondo, S. (2017). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Melalui Program Bedah Rumah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara-ASIAN*, Volume 5 N, 40–42.
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press. 19. 19–37. <http://eprints.umm.ac.id/35915/3/jiptummpp-gdl-haryatikam-49116-3-bab2.pdf>
- Wibawa, S. (1994). *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada Grindle, Merilee S. (Ed). 1980. *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*, New Jersey: Princetown University Press. 19. 19–37. <http://eprints.umm.ac.id/35915/3/jiptummpp-gdl-haryatikam-49116-3-bab2.pdf>
- Widyastuti, N. U. R. A., Brawijaya, U., Administrasi, F. I., Publik, J. A., Studi, P., & Administrasi, I. (2018). *Implementasi Program Bedah Rumah dalam Kabupaten Mojokero*.
- Wirya, I. Gede., & Arnawa, Krishna. (2017). Analisi Dampak Program Bedah Rumah terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Tejakule Buleleng. *E-Jurnal EP Unud*, 2618–2644.



**Lampiran 1. Surat Keterangan Izin Meneliti di Desa Paccerakang**

**UNIVERSITAS BOSOWA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231  
Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568  
Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

---

Nomor : A.318/FSP/UNIBOS/VII/2022  
Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi  
Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

**Kepada Yth,**  
**Kepala Desa Paccerakang**

**Di-**  
**Kabupaten Luwu**

Dengan hormat,  
Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Olivia Cristy Steviani Toding  
NIM : 4518021018  
Judul penelitian : Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Paccerakang Kecamatan Pondrang Selatan Kabupaten Luwu  
Tempat : Kantor Desa Paccerakang  
Waktu : Juli – Agustus 2022

Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 5 Juli 2022  
Dekan Fisip Unibos,  
  
**Dr. Andi Burcahanuddin, S.Sos., M.Si**  
NIDN 0905107005

Tembusan :  
1. Arsip



## Lampiran 2. Surat Keterangan Izin Meneliti ke Dinas PERKIM

 **UNIVERSITAS BOSOWA**  
**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**  
 Jalan Urip Sumoharjo Km. 4, Gd. 1 Lt. 7, Makassar-Sulawesi Selatan 90231  
 Telp. 0411 452 901 – 452 789 Ext. 123, Faks. 0411 424 568  
 Email: info@unibos.ac.id, http://www.unibos.ac.id

---

Nomor : A.318/FSP/UNIBOS/VII/2022  
 Lampiran : 1 (satu) rangkap Proposal Skripsi  
 Perihal : Permintaan Izin Penelitian Penyusunan Skripsi

**Kepada Yth,**  
**Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman**

**Di-**  
**Kabupaten Luwu**

Dengan hormat,  
 Dalam rangka penyelesaian Tugas Akhir/Penulisan Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar, maka kami mohon kiranya kepada mahasiswa tersebut dibawah ini :

Nama : Olivia Cristy Steviani Toding  
 NIM : 4518021018  
 Judul penelitian : Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Desa Paccerakang Kecamatan Pongrang Selatan Kabupaten Luwu  
 Tempat : Kantor Desa Paccerakang  
 Waktu : Juli – Agustus 2022


Untuk dapat diberi bantuan dalam memperoleh data dan informasi serta pengambilan data yang diperlukan dalam penyusunan Tugas Akhir/ Penyusunan Skripsi tersebut.

Demikian harapan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Makassar, 5 Juli 2022  
 Dekan Fisip Unibos,  
  
**Dr. Andi Burcahanuddin, S.Sos., M.Si**  
 NIDN 0905107005

Tembusan :  
 1. Arsip

### Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa Paccerakang

 **PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**KECAMATAN PONRANG SELATAN**  
**DESA PACCERAKANG**  
*Jl. Kantor Desa, Dusun Padang Baru Desa Paccerakang*  
*Email: desapaccerakang@gmail.com*


**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**  
NOMOR : 334/DPC.KPS/VIII/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu menerangkan bahwa :

**N a m a** : OLIVIA CRISTY STEVANI TODING  
**Jenis Kelamin** : Perempuan  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Sangalla, 30 Agustus 2000  
**Alamat** : Dusun Harapan Baru Desa Paccerakang Kec. Ponrang Selatan Kab. Luwu

Benar bahwa Mahasiswi yang namanya tersebut di atas telah melaksanakan Penelitian tentang *"Implementasi Program Bantuan Stimulasi Perumahan Swadaya di Desa Paccerakang Kecamatan Ponrang Selatan Kabupaten Luwu"*.

Demikian surat keterangan ini kami berikan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Paccerakang, 16 Agustus 2022  
Kepala Desa,  
  
**GALALUDIN KASSERINGGI, ST**

**Lampiran 4. Dokumentasi Dengan Kepala Desa Paccerakang tentang proses pelaksanaan BSPS, dana Program BSPS**



**Lampiran 5. Dokumentasi dengan Tim Fasilitator Lapangan (TFL) tentang fungsi TFL, proses pelaksanaan, serta sasaran dari program BPS di Desa Paccerakang**

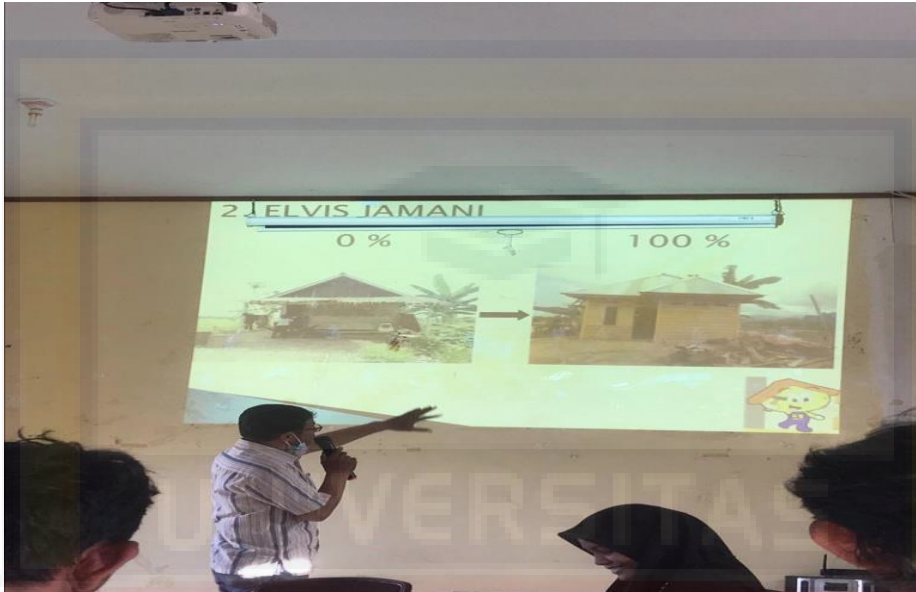


**Lampiran 6. Dokumentasi dengan Tim Fasilitator Lapangan di Desa Paccerakang tentang fungsi TFL, proses pelaksanaan, serta sasaran dari program BPS di Desa Paccerakang**





**Lampiran 7. Dokumentasi sosialisasi PROGRESS BSPS di Desa Paccerakang**



**Lampiran 8. Dokumentasi sosialisasi PROGRESS BSPS di Desa Paccerakang**



### Lampiran 9. Dokumentasi di Dinas PERKIM



### Lampiran 10. Dokumentasi dengan Tim Verifikasi Data pada Dinas PERKIM tentang fungsi Dinas PERKIM dalam pelaksanaan BSPS di Desa Paccerakang



**Lampiran 11. Dokumentasi Masyarakat Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tentang dana yang diberikan**



**Lampiran 12. Dokumentasi Masyarakat Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tentang manfaat BSPS yang di rasakan**

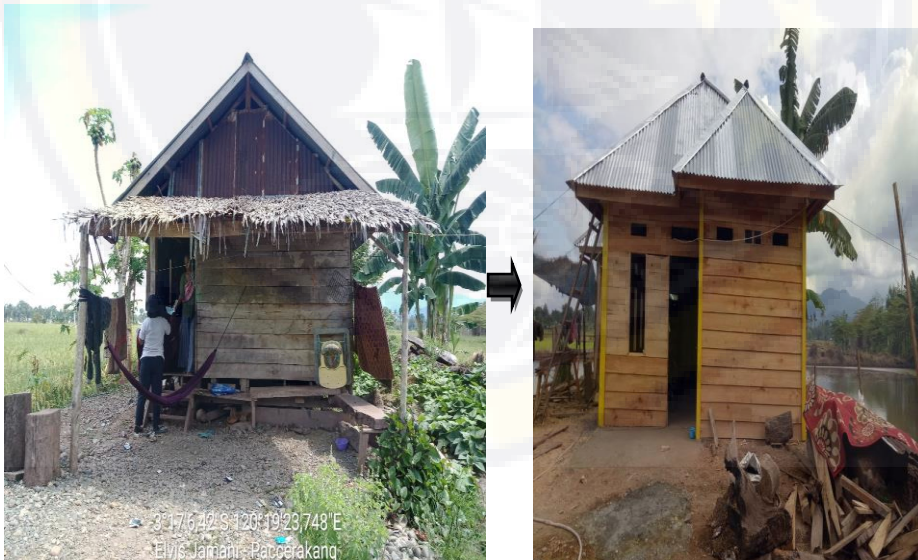




**Lampiran 13. Dokumentasi Masyarakat Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya tentang bantuan BSPS telah tepat sasaran**



**Lampiran 14. Dokumentasi Pembangunan Penerima Bantuan BSPS**





**Lampiran 15. Dokumentasi Pembangunan Penerima Bantuan BPS****Lampiran 16. Dokumentasi Pembangunan Penerima Bantuan BPS**

**Lampiran 17. Dokumentasi Pembangunan Penerima Bantuan BSPP****Lampiran 18. Dokumentasi Pembangunan Penerima Bantuan BSPP**



